

**INKONSISTENSI TIONGKOK TERHADAP *PEACEFUL DEVELOPMENT*
DALAM ISU LAUT TIONGKOK SELATAN**

(Skripsi)

Oleh

FABIO AGUS HARTANU

NPM 1846071011



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

ABSTRAK

INKONSISTENSI TIONGKOK TERHADAP *PEACEFUL DEVELOPMENT* DALAM ISU LAUT TIONGKOK SELATAN

Oleh

Fabio Agus Hartanu

Peaceful development Tiongkok sebagai konsep yang meyakinkan dunia bahwa Tiongkok memiliki sifat alami yang damai secara tidak langsung berperan kepada pertumbuhan ekonomi Tiongkok hingga saat ini. Namun pada saat kepemimpinan Presiden Xi Jinping, Tiongkok jika tidak agresif setidaknya dianggap proaktif jika menyangkut kepentingan nasionalnya di level internasional. Laut Tiongkok Selatan menjadi salah satu isu utama terkait konsistensi Tiongkok terhadap *peaceful development*, klaim sembilan garis putus-putus, reklamasi pulau serta berbagai insiden yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan memperlihatkan adanya inkonsistensi Tiongkok terhadap *peaceful development*. Penelitian ini kemudian akan menjelaskan bagaimana inkonsistensi Tiongkok terhadap *peaceful development* sebagai strategi dalam isu Laut Tiongkok Selatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka yang bersumber dari situs resmi *State Council Information Office, Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, Office of The Secretary of Defense, International Crisis Group, dan Asia Maritime Transparency Initiative*. Penelitian ini menggunakan konsep Dilema Keamanan untuk menjelaskan dilema keamanan yang terjadi bagi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan serta *Offense Defense Advantage* dan *Offense Defense differentiation* untuk menganalisis strategi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inkonsistensi Tiongkok terhadap *peaceful development* dalam isu Laut Tiongkok Selatan terjadi dikarenakan Tiongkok yang terjebak dilema keamanan bersama Vietnam dan Filipina. Hasil analisa memperlihatkan bahwa Inkonsistensi yang dilakukan Tiongkok di LTS dilakukan sebagai upaya mengeliminasi dampak spiral dari dilema keamanan dan melalui inkonsistensi tersebut, Tiongkok memperlihatkan dirinya yang akan terus berada di LTS, berfokus terhadap keamanan dirinya sendiri dan memberikan sinyal atas sifat alaminya yang defensif.

Kata kunci: *Peaceful Development*, Tiongkok, Diferensiasi Ofensif/Defensif, Keuntungan Ofensif/Defensif, Laut Tiongkok Selatan, Dilema Keamanan

ABSTRACT

INCONSISTENCY OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA TOWARDS PEACEFUL DEVELOPMENT IN THE SOUTH CHINA SEA ISSUE

By

Fabio Agus Hartanu

China's peaceful development is a concept that gives assurance to the world that China has a peaceful nature which indirectly contributes to China's economic growth to date. However, after the Xi Jinping's Presidency, researchers say that China is not aggressive, at least considered proactive about its national interests at the international level. The South China Sea is one of the main issues related to China's consistency toward peaceful development. The nine-dash line claims, island reclamation, and various incidents in the South China Sea show the inconsistency of China toward its peaceful development. This research then explains China's inconsistency towards peaceful development as a strategy in the South China Sea Issue

The research is qualitative research using data collection techniques in the form of literature studies sourced from the official website of the State Council Information Office, Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, Office of The Secretary of Defense, International Crisis Group, and Asia Maritime Transparency Initiative. This study uses the concept of Security Dilemma to explain security dilemma that occurs for China in the South China Sea. Offense Defense Advantage and Offense Defense Differentiation to analyze China's strategy in the South China Sea.

The results of the study show that China's inconsistency towards peaceful development in the South China Sea issue occurs because China is trapped in a security dilemma with Vietnam and the Philippines. The analysis revealed that China's inconsistencies in the South China Sea were made as an effort to dispel the spiraling impact of the security dilemma. Through these inconsistencies, China is showing itself to remain in the South China Sea, focused on its security and signaling its defensive nature.

Keywords: Peaceful Development, China, Offense/Defense Differentiation, Offense/Defense Advantage, South China Sea, Security Dilemma

**INKONSISTENSI TIONGKOK TERHADAP *PEACEFUL DEVELOPMENT*
DALAM ISU LAUT TIONGKOK SELATAN**

OLEH

FABIO AGUS HARTANU

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023

Judul Skripsi : INKONSISTENSI TIONGKOK TERHADAP
PEACEFUL DEVELOPMENT DALAM ISU
LAUT TIONGKOK SELATAN
Nama Mahasiswa : Fabio Agus Hartanu
No. Pokok Mahasiswa : 1846071011
Program Studi : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI
Komisi Pembimbing


Iwan Sulistyono, S.Sos., M.A.
NIP. 19860428 201504 1 004


Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.
NIP. 19921219 202203 1 001

Ketua Jurusan Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.


Simon Sumanjoto H, S.A.N., M.PA.
NIP. 19810628 200501 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.



Sekretaris : Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A



Penguji : Gita Karisma, S.IP., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 05 Juli 2023

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 26 Juli 2023



Fabio Agus Hartanu
1846071011

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Palembang pada tanggal 21 September 2000 dari pasangan Bapak Agus Hartanu dan Ibu Nurbaiti sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Penulis menempuh Pendidikan formal pertama di SD Xaverius 5 Palembang, kemudian melanjutkan tingkat menengah pertama di SMP Xaverius 6 Palembang dan tingkat menengah atas di SMA Xaverius 3 Palembang. Penulis Lulus pada tahun 2018 melanjutkan perguruan tinggi Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung.

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif menjadi pengurus organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung periode 2020/2021. Penulis juga berkesempatan untuk menempuh Program Kerja Lapangan di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan mengikuti kegiatan UNCTAD 15.

PERSEMBAHAN

Skripsi saya persembahkan kepada:

1. Ibu serta saudara saya yang telah sabar, mendukung, percaya dan terus mendoakan saya selama ini.
2. Kepada seluruh dosen-dosen Hubungan Internasional yang telah membimbing saya hingga sekarang.
3. Salsabila Aryanti Putri yang telah sabar menemani dan membantu saya selama ini.
4. Serta teman-teman terdekat dan seperjuangan yang telah membantu seluruh proses perkuliahan saya.

SANWANCANA

Syukur kehadiran Allah SWT yang sudah memberi hidayah, rahmat, serta anugerah-Nya sehingga penulis tugas akhir berjudul “Inkonsistensi Tiongkok Terhadap *Peaceful Development* Sebagai Strategi Dalam Isu Laut Tiongkok Selatan” bisa penulis selesaikan sebagai prasyarat menyelesaikan Program Sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis sadar bahwasanya skripsi ini tidak akan selesai apabila tidak ada bimbingan, bantuan, dukungan, dan nasihat dari banyak pihak. Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih setulus-tulusnya penulis sampaikan pada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
3. Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional sekaligus seorang dosen yang senantiasa mendukung Penulis.
4. Gita Karisma, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembahas yang senantiasa memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Iwan Sulisty, S.Sos., M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama yang terus mendukung dan menuntun Penulis dalam setiap proses pengerjaan skripsi ini dan selalu memberikan masukan kepada Penulis.
6. Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang terus mendukung Penulis dalam setiap proses pengerjaan skripsi ini dan selalu percaya serta memahami Penulis.
7. Dosen-dosen Jurusan Hubungan Internasional yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran berharga untuk Penulis baik dalam hal akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari.

8. Mama dan Jub karena selalu mendoakan, mendukung dalam segala hal, memahami dan telah mempercayai Penulis dalam setiap prosesnya.
9. Aqila Baity, Ailsa Arrafiani, Arief Surya, Chita Ayu, Hemastia Kirana, Putri Tasya, Safaana Salwa Salsabilla, Shaqilla Vianta, Rehan Wahyu, Rizqi Renaldy, Rafly Ramadhan, Qoonitah Salma dan Heza Oga Mahendra telah menjadi teman yang membentuk Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.
10. Salsabila Aryanti Putri yang telah sabar, memahami dan menemani setiap langkah Penulis.

Bandarlampung **26 Juli** 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabio', with a large, stylized flourish extending from the end.

Fabio Agus Hartanu

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kajian Pustaka	9
2.2 Landasan Konseptual	14
2.2.1 <i>Security Dilemma in Defensive Neo-Realism</i>	14
2.2.2 <i>Defense – Offense Differentiation dan Defense – Offense Advantage</i>	19
2.2.3 <i>Peaceful Development</i>	23
2.3 Kerangka Pemikiran.....	27
III. METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Fokus Penelitian	31
3.3 Jenis dan Sumber Data	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data	31
3.5 Teknik Analisis Data.....	32
IV. HASIL & PEMBAHASAN	33
4.1 Inkonsistensi Tiongkok Terhadap <i>Peaceful Development</i> dalam Isu Laut Tiongkok Selatan	33
4.1.1 Reklamasi Laut Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan 2013-2015	34
4.1.2 Kapabilitas Militer Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan	38
4.1.3 Mekanisme Konsultasi Bilateral Tiongkok – Filipina	41
4.1.4 Eskalasi Konflik Tiongkok dengan Vietnam/Filipina di LTS	44
4.2 Alasan dan Tujuan Inkonsistensi Tiongkok Terhadap <i>Peaceful Development</i> dalam Isu Laut Tiongkok Selatan	53
4.2.1 Dilema Keamanan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.....	53
4.2.2 Keuntungan Ofensif/Defensif Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan ...	55
4.2.3 Diferensiasi Ofensif/Defensif Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan ...	58

V. SIMPULAN & SARAN	70
5.1 Simpulan	70
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Klaim Sembilan Garis Putus-Putus Tiongkok	5
2. Pulau Woody	6
3. Dilema Keamanan menurut Butterfield Herz dan Jervis	18
4. Hubungan Kausal Dilema Keamanan dan Perang	19
5. Kerangka Pemikiran	29
6. Teknik Analisis Data Kualitatif	32
7. Gambar Satelit Pulau <i>Fiery Cross Reef</i> 2015 dan 2022	35
8. Blokade dan Tembakan Meriam Air oleh Tiongkok kepada Filipina	46
9. Kapal Milisi Tiongkok di Dekat Pulau Thitu	48

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	13
2. Inkonsistensi Tiongkok Terhadap <i>Peaceful Developmnet</i> dalam Isu Laut Tiongkok Selatan	52
3. Analisis Keuntungan Ofensif/Defensif Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.	57
4. Hasil Analisis Pola Kebijakan Tiongkok Pada Beberapa Insiden di Laut Tiongkok Selatan	67
5. Posibilitas Hubungan Tiongkok dengan Vietnam dan Filipina Atas Hubungan Keuntungan Defensif/Ofensif dan Diferensiasi Defensif/Ofensif	68

DAFTAR SINGKATAN

ADIZ	: <i>Air Defense Identification Zone</i>
AMTI	: <i>Asia Maritime Transparency Initiative</i>
ASEAN	: <i>The Association of Southeast Asian Nation</i>
BCM	: <i>Bilateral Consultation Mechanism</i>
BRI	: <i>Belt and Road Initiative</i>
CCP	: <i>Chinese Communist Party</i>
COC	: <i>Code of Conduct</i>
CPR	: <i>Cold Peaceful Rise</i>
KMT	: <i>Kuomitang</i>
LTS	: <i>Laut Tiongkok Selatan</i>
MOU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
NIDS	: <i>The National Institute for Defense</i>
PDB	: <i>Produk Domestik Bruto</i>
RRT	: <i>Republik Rakyat Tiongkok</i>
UNCLOS	: <i>United Nation Convention on The Law of the Sea</i>
VFRS	: <i>Vietnam Fisheries Resources Surveillance</i>
WPR	: <i>Warm Peaceful Rise</i>
ZEE	: <i>Zona Ekonomi Eksklusif</i>

I. PENDAHULUAN

Bab ini akan memaparkan latar belakang negara Tiongkok dan *peaceful development*, rumusan permasalahan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian sebagai bentuk pengenalan dan pemahaman dasar atas permasalahan penelitian yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

1.1 Latar Belakang dan Masalah

'*Century of humiliation*' merupakan pandangan negara Tiongkok terhadap dirinya pada periode 1850-1950 (Buzan, 2010). Era tersebut merupakan masa kegelapan bagi Tiongkok yang diakibatkan oleh masuknya imperialisme. Periode ini dimulai dari adanya Perang Opium pertama (1839-1842) dan kedua (1856-1860) sebagai penanda masuknya imperialisme barat di Tiongkok (Asia for Educators, 2022). Hal tersebut mengakibatkan runtuhnya dinasti Qing pada 1912 serta perubahan pada sistem pemerintahan Tiongkok menjadi Republik yang kemudian membentuk dua partai politik didalamnya yaitu Partai Nasional (KMT) pada Oktober 1919 dan Partai Komunis Tiongkok (CCP) pada 1921 (Asia for Educators, 2022). Perang sipil (1945-1949) antara kedua partai tersebut dalam mendapatkan pengaruh diseluruh wilayah Tiongkok menjadi fase terakhir bagi '*Century of humiliation*'. Perebutan kekuasaan ini dimenangkan oleh partai Komunis dibawah kepemimpinan Mao Zedong yang membentuk negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada oktober 1949 (Britannica, 2022). Dibawah Mao Zedong, Tiongkok kembali mengasingkan diri terhadap barat, Mao berfokus pada restorasi dan reformasi identitas, kultur dan ideologi terhadap masyarakatnya serta industrialisasi besar-besaran yang disebut dengan *The Great Leap Forward* yang mengakibatkan hingga 30,000 ribu kematian karena krisis kelaparan (Asia for Educators, 2022).

Pada akhir kepemimpinan Mao, mulai dari tahun 1970an Tiongkok mengalami pergeseran sikap atas bagaimana dirinya melihat dunia luar. Kebijakan revolusionis Mao yang menolak dominasi barat bergeser menjadi keterbukaan

Tiongkok terhadap sistem internasional serta model ekonomi barat secara damai. Kematian Mao Zedong pada 1976 menandai keterbukaan secara penuh Tiongkok kepada dunia internasional dan pada 1980 telah mampu membuat kebijakan terkait pendekatan politik dirinya ke dunia internasional yang sudah menggunakan unsur non-revolusionis (Buzan, 2010). Tentu saja sebagai negara komunis, Tiongkok tidak secara penuh menerima seluruh standar Westphalia yang diberikan masyarakat dunia, terdapat penekanan di dalam pendekatan Tiongkok terhadap negara Barat bahwa ia akan menemukan jalan menyatukan kerjasama internasional dengan karakteristik Tiongkok (Buzan, 2010).

Tiongkok berubah dari negara sangat miskin menjadi negara yang memiliki modal untuk mempengaruhi dunia internasional hanya dalam kurun waktu 30 tahun. Pertumbuhan kekuatan secara cepat oleh Tiongkok memunculkan teori *China Threat* yang pertama kali dimulai oleh Korea dan disebarkan oleh Jepang dan Amerika Serikat. Tiongkok dikatakan akan menjadi ancaman besar bagi masyarakat Internasional khususnya Amerika sebagai negara adikuasa. Perbedaan atas budaya, tradisi, cara hidup dan nilai atas suatu konsep antara kedua negara dinilai akan menjadi penyebab datangnya ancaman tersebut ketika posisi Tiongkok telah cukup kuat "*The Coming Conflict With China*" (Bernstein & Munro, 1997). Bagi Huntington, kedekatan Tiongkok dengan negara Islam juga akan menjadi ancaman bagi peradaban barat (Huntington, 1993). Sangat dimungkinkan terjadinya pertemuan kekuatan antara kedua negara serta transisi kekuatan yang berpotensi terhadap perang, terlebih lagi ketika sang penantang merupakan negara yang tidak berideologikan demokrasi (Organski, 1958; Schweller, 1992).

Tiongkok cukup cepat dalam merespon hal tersebut, pada November 2003, Zheng Bijian seorang mantan Wakil Ketua Sekolah Partai Pusat Partai Komunis Tiongkok dalam pidatonya berjudul "*A New Path for China's Peaceful Rise and the Future of Asia*" memelopori gerakan atas sebuah konsep baru untuk Tiongkok dan Masyarakat Internasional. Konsep tersebut disebut dengan *peaceful rise* (*heping jueqi*). Merupakan sebuah konsep, rencana strategis bagi perkembangan Tiongkok di sistem internasional tanpa menjarah sumber daya melalui invasi, kolonialisasi, ekspansi serta perang. Di sisi sebaliknya, bagi Zheng *peaceful rise*, akan memberikan integrasi hubungan yang baik, perkembangan, keuntungan dan

stabilitas bersama bagi negara tetangga dan Asia (Bijian, 2005). Walaupun Tiongkok memiliki karakteristik untuk bergantung pada kekuatannya sendiri, perdamaian di dunia internasional tetap dibutuhkan untuk menyelesaikan tantangan untuk meningkatkan standar kehidupan populasi yang masih belum berkembang (Suettinger, 2004). Dalam kata lain, Zheng menekankan bahwa Tiongkok tidak mencari hegemoni ataupun dominasi di dunia internasional dan akan berfokus membenahi dirinya sendiri. *Peaceful rise* kemudian menjadi bagian penting di dalam pemerintahan Tiongkok dibawah presiden Hu Jintao. Konsep ini sedikit dirubah oleh presiden Hu menjadi '*peaceful development*' karena '*rise*' dianggap kata yang bersifat agresif (Buzan, 2014).

Pada KTT peringatan 60 tahun PBB di tahun 2005, Presiden Hu Jintao juga memperkenalkan konsep yang searah dengan konsep *peaceful development* yaitu '*harmonious world*' (Guo & Blanchard, 2008). Dalam pidatonya '*Build Towards a Harmonious World of Lasting Peace and Common Prosperity*', Presiden Hu menekankan pentingnya multilateralisme, kerjasama kolektif dan Dewan Keamanan PBB yang lebih representatif akan membantu membangun dunia yang harmonis (Hu, 2005). Ia mengingatkan sebagai dengan sifat damai, pembangunan Tiongkok bukan akan menyakiti atau mengancam siapapun alih-alih melayani perdamaian, stabilitas dan kemakmuran bersama di dunia (Hu, 2005). *Peaceful development* pada dasarnya merupakan strategi besar yang telah mengakar bahkan sebelum Zheng memperkenalkan hal tersebut sebagai sebuah konsep, Hal tersebut telah dipraktikkan oleh Tiongkok dimulai ketika Deng Xiaoping memulai reformasi dan membuka diri. *Peaceful development* merepresentasikan jalan yang diambil oleh pemimpin negeri Deng Xiaoping, Jiang Zemin dan Hu Jintao (Zheng, 2004).

Peaceful development hingga saat ini kemudian memainkan peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi Tiongkok, dengan PDB sebesar 8,532.23 milyar dollar di tahun 2012 (Macrotrends, 2022) dan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia (Citéco, 2010). Namun pasca kepresidenan Xi Jinping pemerintahan secara cepat melakukan beberapa perubahan terkait kebijakan politik luar negerinya, perubahan tersebut mengarah pada makna sifat yang lebih asertif dari kepemimpinan sebelumnya. Beberapa ahli juga melihat perubahan ini sebagai Tiongkok yang lebih pro-aktif di level internasional, dengan

pernyataan *'one of the most active periods for Chinese foreign policy'* (Singh, 2014). Kepercayaan diri Tiongkok juga tertuang dari berbagai pernyataan yang diberikan oleh Xi Jinping seperti pada tahun 2017 dalam Kongres Nasional PKC ke-19, ia menyoroti bahwa Tiongkok telah mencapai transformasi menjadi luar biasa, negara ini telah berdiri, menjadi kaya dan kuat. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak mengambil posisi kepemimpinan dunia dan memberikan kontribusi besar terhadap umat manusia (BBC News, 2017). Kepercayaan ini terimplementasi pada dua tumpuan Tiongkok yaitu *Chinese Dream* yang diartikan bahwa Tiongkok harus menegakkan dan mengembangkan sosialisme dengan karakteristik Tiongkok untuk membentuk negara yang kaya dan kuat, merevitalisasi bangsa serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, tumpuan selanjutnya ialah Konstitusi Partai tahun 2017 yang dikenal sebagai *'four matters of confidence'* yang diartikan Tiongkok harus memiliki kepercayaan pada jalan, teori, sistem dan budaya sosialisme dengan karakteristik Tiongkok (China Daily, 2018). Kekuatan dan kepercayaan diri melalui kedua tumpuan tersebut terefleksikan oleh kebijakan luar negerinya (Johnston, 2013). Tiongkok lebih akan bersifat proaktif bahkan asertif terhadap berbagai isu di level internasional yang menyangkut dengan kepentingan nasionalnya terbukti melalui berbagai sikap seperti unifikasi Tiongkok dengan Taiwan, bentrok di sungai Galwan dengan India, ADIZ Tiongkok di pulau Senkaku, dan perang dagang dengan Amerika Serikat.

Laut Tiongkok Selatan (LTS) menjadi salah satu agenda penting untuk kepentingan nasional Tiongkok terkait kedaulatan wilayah. LTS menjadi wilayah geopolitik strategis bagi Tiongkok karena dilalui setidaknya 80% impor minyak Tiongkok, memiliki proporsi yang signifikan bagi pemenuhan pasokan ikan tahunan Tiongkok, memiliki setidaknya 105 milyar cadangan hidrokarbon dan dinilai sebagai *buffer zone* (wilayah yang mengurangi resiko eskalasi perang) bagi ancaman militer mendatang. Terdapat setidaknya empat pulau didalam LTS yaitu, pulau *Pratas*, pulau *Paracel*, *Macclesfield Bank* dan pulau *Spratly* yang diklaim sebagai milik Tiongkok atas dasar sejarah sebagai negara pertama yang menemukan, menamakan dan menggunakan pulau tersebut lebih dari dua abad (Zhang, 2015). Pada 1953, Tiongkok telah mendeklarasikan 'sembilan garis putus-putus' di LTS dan saat itu tidak ada protes apapun yang dilayangkan baik dari

komunitas internasional maupun negara tetangga, Atas hal ini Tiongkok menganggap bahwa klaimnya atas LTS telah diterima dan diakui oleh komunitas internasional (JinMing & Dexia, 2003). Setelah menjabat Presiden Xi melakukan berbagai usaha yang lebih ekstra atas klaim wilayah *'nine-dash line'* dengan menempatkan rig minyak di dekat perairan Paracel, mempertahankan kehadirannya di bagian selatan Sparty, membangun mercusuar, mereklamasi tanah dan memperluas terumbu karang dan membangun landasan udara, pelabuhan, dan stasiun pasokan bagi Angkatan laut di pulau pulau tersebut (Perlez, 2014).



Gambar 1. Klaim Sembilan Garis Putus-Putus Tiongkok
Sumber: International Crisis Group

Sikap asertif tersebut kemudian memiliki berbagai respon dari negara Asia Tenggara, terdapat tiga klasifikasi respon dari negara ASEAN mengenai tersebut yaitu negara yang mengakomodasi (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Thailand), negara yang memiliki kepentingan signifikan atas konflik yang terjadi (Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei) serta negara yang keras dalam menghadapi isu kedaulatan (Vietnam dan Filipina). Atas perbedaan pandangan serta sikap diantara negara ASEAN, konflik ini cenderung diselesaikan secara bilateral antar negara ASEAN dan Tiongkok. Kecaman datang terkhusus dari kedua negara yaitu Vietnam dan Filipina, Vietnam menganggap penyebaran rig minyak merupakan langkah yang keterlaluan dan pelanggaran berbahaya atas hukum internasional serta memberikan ancaman yang serius bagi jalur laut paling krusial di dunia (Wong,

2014) dan Filipina yang memberikan pernyataan bahwa hal tersebut akan meningkatkan momok bagi negara lain untuk menggunakan akses perdagangan serta penangkapan ikan di laut tersebut yang menimbulkan ketakutan bagi negara di dunia (AFP, 2015). Kecaman ini datang atas dua insiden yang berbeda di LTS yaitu pada 2013 dimana Tiongkok membangun pulau buatan melalui reklamasi dan konstruksi di area *spartly* dan datangnya para nelayan Tiongkok di area karang *scarborough* yang berdampak Filipina yang melakukan opsi legal dimana ia mengajukan kasus yang menantang klaim territorial Tiongkok dibawah lampiran VII Konvensi PBB Tentang Hukum Laut (UNCLOS) (International Crisis Group, 2021b) dan pada 2014 dimana Tiongkok menempatan rig minyak *'Haiyang Shiyou 981'* di zona ekonomi eksklusif Vietnam, konflik ini berlangsung selama dua bulan yang menyebabkan kerusuhan di kota-kota Vietnam dan berdampak pada dihancurkannya berbagai pabrik milik Tiongkok (International Crisis Group, 2021c).



Gambar 2. Pulau Woody

Sumber: Air Maritime Transparency Initiative, CSIS

Sikap asertif Tiongkok kemudian memunculkan pertanyaan apakah *peaceful development* tetap menjadi jalan yang dipilih oleh Tiongkok di level internasional. Terdapat pro/kontra atas pertanyaan mendasar “apakah Tiongkok mengakhiri jalan dari strategi *peaceful development*?” Beberapa penulis setuju dengan mengatakan bahwa sikap asertif tersebut merefleksikan berakhirnya kebijakan *peaceful development* di Tiongkok (Dobell, 2014; Lee, 2013; Tuan, 2014). Lainnya yang setuju melihat bahwa kebijakan luar negeri Tiongkok telah berorientasi terhadap

status quo (Johnston, 2013). Di sisi sebaliknya, Barry Buzan melihat *peaceful development* tetap sebagai strategi utama bagi Tiongkok di era ini (Buzan, 2014). Sedangkan penulis lainnya memiliki argumen bahwa, *peaceful development* mengalami perubahan makna dimana Tiongkok membutuhkan komitmen negara lainnya untuk mewujudkan perdamaian (Zhang, 2015). *Peaceful development* sendiri telah melekat dengan Tiongkok jauh sebelum Zheng Bijian memperkenalkan konsep tersebut di 2003, dirinya berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang telah dilakukan Tiongkok ketika Deng Xiaoping memulai reformasi dan membuka diri ke dunia internasional.

Penulis menilai bahwa sikap asertif yang tidak mendasar dari Tiongkok di LTS bukanlah hal yang cukup baik bagi dirinya mengingat dampaknya ialah konflik langsung dengan negara-negara Asia Tenggara. Asia Sebagai kunci pertama Tiongkok untuk mencapai status hegemoni selaras dengan pendapat Yuen Foong Khong yang berkata Asia adalah tempat dimana Tiongkok harus membangun prestis atau reputasi kekuatan (Gong, 2020). Mempertahankan strategi *peaceful development* dengan membangun hubungan yang baik secara bilateral kepada masing-masing negara Asia Tenggara tentu esensial demi mengamankan akses perdagangan dan jalur 80% impor minyak Tiongkok serta untuk melimitasi akses dan intervensi laut dari Amerika sebagai negara hegemoni saat ini. Inkonsistensi hubungan antara Tiongkok dengan Vietnam dan Filipina dapat menjadi malapetaka bagi Tiongkok dimasa mendatang karena asertifitas tersebut membuka kemungkinan terjadinya perang. Sehingga penting bagi negara lain untuk memahami secara mendalam terkait inkonsistensi yang terjadi. Pemahaman tersebut akan membantu negara khususnya negara-negara Asia Tenggara untuk memproyeksikan tindakan Tiongkok pada tahun yang akan datang.

1.2 Rumusan Masalah

Melalui paparan latar belakang, peneliti menemukan bahwa kondisi yang ideal bagi Tiongkok dibawah kepemimpinan Xi Jinping adalah dengan terus menggunakan *peaceful development* dan mempertahankan hubungan yang baik dengan Vietnam dan Filipina sebagai salah satu jangkar utama pengaruh Tiongkok di Asia dan dunia. Namun faktanya, Presiden Xi Jinping membuat kebijakan luar negeri di LTS

menjadi lebih asertif yang mengakibatkan memanasnya hubungan antara Tiongkok dengan Vietnam dan Filipina. Atas kondisi yang terjadi, penelitian ini dibangun dengan tujuan untuk memahami inkonsistensi Tiongkok terhadap *peaceful development* dalam isu LTS, dengan rumusan masalah: **Mengapa inkonsistensi Tiongkok terhadap *Peaceful Development* terjadi dalam isu Laut Tiongkok Selatan?**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan inkonsistensi Tiongkok terhadap *Peaceful Development* dalam isu Laut Tiongkok Selatan
2. Menganalisa alasan dan tujuan inkonsistensi Tiongkok terhadap *Peaceful Development* dalam isu Laut Tiongkok Selatan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk:

1. Akademis

Secara akademis penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu Hubungan Internasional khususnya pada kajian isu terkait keamanan, kepentingan nasional, dilema keamanan dan perspektif neo-realisme.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan kontribusi bagi pembuat kebijakan di berbagai negara dalam memahami alasan atas inkonsistensi sikap Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan saat ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan memaparkan kajian pustaka yang berisikan lima jurnal yang digunakan sebagai dasar pemahaman penulis terkait Tiongkok, *peaceful development* dan Laut Tiongkok Selatan. Dilanjutkan dengan pemaparan landasan konseptual serta kerangka pikir penelitian.

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah kerangka yang disusun sebagai proses pengklasifikasian sumber-sumber data yang penting sebagai pondasi pembangun penelitian ini. Tujuan dari kajian pustaka adalah untuk membantu penulis dalam mendapatkan pemahaman terkait permasalahan yang dikaji, serta dapat melihat fenomena yang diteliti secara lebih luas dan menyeluruh sehingga membantu proses analisis dari topik penelitian terkait, yaitu *peaceful development*, kebijakan agresif/asertif Tiongkok, kondisi struktural sistem internasional dan lainnya. Dalam hal ini penulis menghimpun beberapa penelitian terdahulu yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku ilmiah dan laporan penelitian yang relevan dengan topik bersangkutan. Berikut beberapa penelitian yang bersinggungan dengan topik penelitian penulis:

***China in International Society: Is 'Peaceful Rise' Possible?* Barry Buzan (2010)**

Penelitian pertama merupakan sebuah jurnal karya Barry Buzan, seorang Guru besar dibidang Hubungan Internasional di Universitas *London School of Economics*. Jurnal yang ia tulis adalah "*China in International Society: Is 'Peaceful Rise' Possible?*" yang dirilis pada tahun 2010 didalam *The Chinese Journal of International Politics*. Didalam jurnal tersebut, Barry Buzan mencoba mendeskripsikan serta menganalisis kemungkinan atas terwujudnya kondisi dimana Tiongkok sebagai *rising power* akan mencapai negara berstatus quo secara damai di sistem internasional. Dalam menganalisis kemungkinan tersebut, Barry Buzan menggunakan pendekatan *english school* karena dinilai melihat dunia internasional yang lebih terbuka dan seimbang dibandingkan realisme yang sensitif

terhadap ancaman dan konflik serta liberalisme yang terlalu menitikberatkan organisasi internasional untuk mengelola dunia. Terdapat tiga kunci utama kesuksesan Tiongkok dalam tumbuh sebagai negara status quo, pertama bagaimana ia harus berhadapan dengan Amerika Serikat sebagai negara super power, Tiongkok harus menghindari konflik dengan Amerika, namun jika berada ditahap dimana konflik tersebut tidak dapat di hindari, Tiongkok harus memastikan bahwa Amerika sendirian dalam hal tersebut, Kedua mempertahankan hubungan baik dengan Jepang dan membangun regional konsensus di level Asia Timur, dan terakhir hubungan Tiongkok dengan dunia internasional, Tiongkok harus memberikan identitas yang jelas dan tepat di dalam sistem internasional, kebijakan politik dan ekonomi serta respon terhadap permasalahan dunia menjadi bahan penilaian terkait kearah mana Tiongkok bertindak.

The Logic and Contradictions of ‘Peaceful Rise/Development’ as China’s Grand Strategy, Barry Buzan (2014)

Penelitian kedua merupakan sebuah jurnal karya Barry Buzan, seorang Guru Besar dibidang Hubungan Internasional di Universitas *London School of Economics*. Jurnal yang ia tulis berjudul “*The Logic and Contradictions of ‘Peaceful Rise/Development’ as China’s Grand Strategy*” yang dirilis pada tahun 2014 di dalam *The Chinese Journal of International Politics*. Didalam jurnal tersebut Barry Buzan mencoba menjelaskan dan memetakan apakah *peaceful rise/development* merupakan strategi jangka panjang atau hanyalah propaganda yang dipakai ketika Tiongkok masih lemah. Barry Buzan membentuk tiga model *peaceful rise* menjadi *hot, cold and warm*. *Hot peaceful rise* dinilai tidak realistis karena merupakan model yang menginginkan kondisi damai yang utuh di sistem internasional. Dalam kondisi Tiongkok yang telah menguat, ia beragumen bahwa *peaceful development* dapat menjadi *cold peaceful rise* (CPR) maupun *warm peaceful rise* (WPR). Tiongkok dapat dengan mudah menggunakan kekuatan politik dan militer (CPR) namun dinilai beresiko tinggi bagi keamanan sistem internasional, di sisi lain Tiongkok akan dilihat sebagai negara yang retorik yang berdampak jangka panjang bagi dirinya, di sisi lain melalui kesepakatan konsensus (WPR) Tiongkok dapat

memberikan model sistem internasional yang baru (*post-western*), lebih plural dan multiporal.

***Destined for War, Can America and China Escape Thucydides Trap?* Graham Allison (2017)**

Penelitian ketiga merupakan sebuah buku karya Graham Allison, Profesor Pemerintahan Douglas Dillon, Sekolah Pemerintahan John. F. Kennedy, Universitas Harvard. Buku yang ia tulis berjudul “*Destined for War, Can America and China Escape Thucydides Trap?*”, diterbitkan oleh *Houghton Mifflin Harcourt*, pada tahun 2017 di Boston. Secara garis besar buku ini menjelaskan tentang bagaimana sebuah negara *status quo* dan negara *rising power* pada titik tertentu akan saling berbenturan. Ia menggunakan dasar pemikiran Thucydides yaitu ‘*The History of the Peloponnesian War*’ untuk menganalisis apa yang terjadi diantara Amerika dan Tiongkok saat ini. Amerika dinilai akan merasa terancam dengan menguatnya Tiongkok di sisi lain Tiongkok akan merasa bahwa Amerika menghalangi dirinya untuk menjadi kuat. Graham Allison mengaplikasikan teori *Thucydides Trap* kepada serangkaian kejadian dan kekuatan besar di dunia dan 12 dari 16 peristiwa yang sama memberikan hasil peperangan. Melalui 4 kasus yang tidak menghasilkan perang, Allison menyimpulkan terdapat beberapa usaha untuk terhindar dari *Thucydides Trap* seperti keterikatan ekonomi politik yang kuat serta interdependensi, permasalahan non-tradisional (iklim, lingkungan, terorisme dan lainnya) dan dampak serta resiko dari peperangan menjadi pertimbangan yang berat antara kedua negara.

***The Rise and Fall of China’s ‘Peaceful Rise’: Implications for US-China Geopolitical Competition in the Indo-Pacific*, Kwun-Sun Lau (2022)**

Penelitian keempat merupakan sebuah jurnal karya Raymond Kwun-Sun Lau, Asisten Profesor Ilmu Politik di North South University dan pernah menjadi Dosen Sejarah di Hong Kong Baptist University. Berjudul “*The Rise and Fall of China’s ‘Peaceful Rise’: Implications for US-China Geopolitical Competition in the Indo-Pacific*”, jurnal ini berusaha untuk mendeskripsikan hilang/runtuhnya *peaceful rise* Deng Xiaoping (1978) dan harmonius world Hu Jintao (2015) di masa kepemimpinan Presiden Xi Jinping melalui berbagai sikap asertifnya. Melalui

'*Chinese Dream*' dan '*four matters of confidence*', Presiden Xi mulai mengarahkan Tiongkok ke arah yang lebih agresif di dunia internasional. Jurnal ini secara spesifik membahas salah satu kebijakan asertif Tiongkok yaitu Belt Road Initiative (BRI) yang secara langsung dinilai menjadi alternatif atas model demokrasi barat serta pasar bebas dari barat. Jurnal ini menarik kesimpulan bahwa kepercayaan diri yang dimiliki Tiongkok atas kekuatannya telah memberikan dorongan untuk dirinya memproyeksikan jalan alternatif serta melepaskan diri dari sistem yang diberikan oleh barat, Tiongkok dinilai meninggalkan potret dirinya yang kuat serta rendah hati (*peacefull rise/development*) dan memilih untuk bersifat asertif atas kepentingan nasionalnya karena menilai bahwa dirinya telah cukup kuat di sistem internasional.

Explaining the Contradiction in China's South China Sea Policy: Structural Drivers and Domestic Imperatives, Cheng-Chwee Kuik (2017)

Penelitian kelima merupakan sebuah jurnal karya Cheng-Chwee Kuik, merupakan *associate professor* di Universitas Kebangsaan Malaysia. Berjudul "*Explaining the Contradiction in China's South China Sea Policy: Structural Drivers and Domestic Imperatives*", Jurnal ini berusaha untuk menjelaskan alasan mendasar dari kontradiksi kebijakan Tiongkok yang terjadi di LTS melalui pendorong struktural dan kondisi domestik. Kesempatan struktural didapatkan Tiongkok melalui krisis pada 2008 yang menyebabkan berkurangnya legitimasi Amerika, Hal ini membentuk kepercayaan diri Tiongkok untuk mengambil alih kekuatan regional dan bersikap lebih asertif, di sisi lain kondisi domestik dinilai menjadi pengaruh kuat dimana tekanan atas dasar nasionalisme mengarahkan Beijing untuk tidak dapat mundur atas kepentingan maritimnya. Tiongkok dinilai sangat berhati-hati atas kebijakan asertifnya di LTS, mereka akan mencoba hadir namun tidak untuk konfrontasi secara langsung, Tiongkok juga berusaha untuk mengesampingkan sikap asertif tersebut melalui jalur ekonomi yaitu Belt Road Initiative (BRI) hal ini merupakan penyeimbang agar konfrontasi secara langsung tidak pernah terjadi.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Judul	<i>China in International Society: Is 'Peaceful Rise' Possible?</i>	<i>The Logic and Contradictions of 'Peaceful Rise/Development' as China's Grand Strategy</i>	<i>Destined for War, Can America and China Escape Thucydides Trap?</i>	<i>The Rise and Fall of China's 'Peaceful Rise': Implications for US-China Geopolitical Competition in the Indo-Pacific</i>	<i>Explaining the Contradiction in China's South China Sea Policy: Structural Drivers and Domestic Imperatives</i>
Penulis	Barry Buzan	Barry Buzan	Graham Allison	Kwun-Sun Lau	Cheng-Chwee Kuik
Konsep	<i>Peaceful Rise</i> dan Teori English School	Konsep <i>Hot, Cold</i> dan <i>Warm Peaceful Rise</i>	Teori Thucydides Trap	Konsep Geopolitik	Teori Dorongan Struktural dan Domestik
Jenis Penelitian	Metode penelitian kuantitatif	Metode penelitian kuantitatif dan analisis deskriptif	Metode penelitian kuantitatif dan analisis deskriptif	Metode penelitian kualitatif	Metode penelitian kuantitatif dan analisis deskriptif
Fokus Penelitian	Mendesripsikan serta menganalisis kemungkinan atas terwujudnya kondisi dimana Tiongkok sebagai <i>rising power</i> akan mencapai negara berstatus quo secara damai di sistem internasional	Menjelaskan dan memetakan apakah <i>peacefull rise/development</i> merupakan strategi jangka panjang atau hanyalah propaganda yang dipakai ketika Tiongkok masih lemah	Menjelaskan tentang bagaimana sebuah negara <i>status quo</i> dan negara <i>rising power</i> pada titik tertentu akan saling berkonflik	Mendesripsikan hilang/runtuhnya <i>peaceful rise</i> Deng Xiaoping (1978) dan harmonius world Hu Jintao (2015) di masa kepemimpinan Presiden Xi Jinping	Menjelaskan alasan mendasar dari kontradiksi kebijakan Tiongkok yang terjadi di LTS melalui pendorong structural dan kondisi domestik
Hasil Penelitian	Dalam menyukseskan <i>peaceful rise/development</i> , Tiongkok harus menekan konflik seminimal mungkin dengan Amerika Serikat, Mempertahankan hubungan yang baik ditingkat regional secara konsesus	Tiongkok dapat dengan mudah menggunakan kekuatan politik dan militer (CPR) namun dinilai beresiko tinggi bagi keamanan sistem internasional, di sisi lain Tiongkok akan	Terdapat beberapa usaha untuk terhindar dari <i>Thucydides Trap</i> seperti keterikatan ekonomi politik yang kuat serta interdependensi, permasalahan non-tradisional	kepercayaan diri yang dimiliki Tiongkok atas kekuatannya telah memberikan dorongan untuk dirinya memproyeksikan jalan alternatif serta melepaskan diri dari sistem yang diberikan oleh barat,	Sikap asertif Tiongkok berasal dari kesempatan struktural yang membuka kesempatan Tiongkok untuk menjadi kekuatan regional, di sisi lain tekanan domestik atas nilai

	terutama dengan Jepang serta memberikan sikap yang tegas dan representatif atas damai yang diinginkan oleh Tiongkok di mata Internasional.	dilihat sebagai negara yang retorik yang berdampak jangka panjang bagi dirinya, di sisi lain melalui kesepakatan konsensus (WPR) Tiongkok dapat memberikan model sistem internasional yang baru (<i>post-western</i>), lebih plural dan multiporal.	(iklim, lingkungan, terorisme dan lainnya) dan dampak serta resiko dari peperangan menjadi pertimbangan yang berat antara kedua negara.	Tiongkok dinilai meninggalkan potret dirinya yang kuat serta rendah hati (<i>peacefull rise/development</i>) dan memilih untuk bersifat asertif atas kepentingan nasionalnya karena menilai bahwa dirinya telah cukup kuat di sistem internasional.	nasionalisme memberatkan Tiongkok untuk mundur. Namun Tiongkok memahami bahwa sikap asertif yang memunculkan konfrontasi langsung tidak baik bagi dirinya sehingga ia juga menawarkan penyimbang yaitu BRI sehingga konflik tidak tereskalasi secara penuh
Perbedaan	Dalam penelitian ini penulis akan mencoba menganalisis berbagai kebijakan Tiongkok yang selaras dan tidak selaras dengan apa yang dianalisa Barry Buzan lalu mencoba menjawab alasan dan tujuan inkonsistensi yang dilakukan Tiongkok di LTS	Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan asumsi konsep yang dibentuk Barry Buzan untuk membantu penelitian mengklasifikasikan perilaku inkonsisten Tiongkok	Dalam penelitian ini penulis akan secara mendalam melihat bagaimana Tiongkok melihat resiko keamanan dirinya serta upayanya atas hal tersebut	Dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisa lebih lanjut bagaimana hubungan yang inkonsisten antara sikap asertif dan kerjasama dapat menjadi pilihan bagi Tiongkok di LTS	Dalam penelitian ini penulis akan mencoba menggunakan berbagai asumsi dasar penelitian tersebut untuk menganalisis kebijakan Tiongkok secara lebih mendalam terhadap LTS dan kerjasamanya dengan Vietnam dan Filipina

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 *Security Dilemma in Defensive Neo-Realism*

Secara ontologi, terdapat perbedaan yang mendasar terkait bagaimana realisme dan neo-realisme melihat sistem internasional. Realisme mencoba menjelaskan bagaimana sifat manusia yang direfleksikan oleh negara menjadi aktor tunggal yang membentuk sistem internasional yang anarkis, neo-realisme melihat bagaimana struktur internasional yang didasari oleh sifat anarkis menghasilkan sistem internasional di dunia (Ciftci, 2009). Dalam hal ini neo-realisme melihat anarki sebagai sebuah sistem, dimana anarki

merupakan sebuah pembuat dan bukan sebagai hasil yang menghasilkan asumsi bahwa posibilitas untuk dieksploitasi menjadi pendorong sebuah anarki dibandingkan dengan keinginan untuk mengeksploitasi (Shimko, 1992). Menurut Kenneth Waltz sistem internasional dihasilkan oleh adanya struktur dan unit, dalam hal ini negara menjadi unit dan interaksi antar unit tersebut yang kemudian menghasilkan sebuah struktur internasional dan struktur ini menghasilkan prinsip-prinsip yang anarkis (Waltz, 1979). Struktur internasional berfungsi untuk menciptakan perangkat kerja untuk menghasilkan keseragam hasil melalui berbagai input dan membentuk suatu pembatas atas berbagai hal, Sehingga berbagai tindakan negara mendapat berbagai sanksi, hadiah dan kesempatan oleh struktur internasional (Waltz, 1979).

Tidak seperti realisme yang melihat kekuatan sebagai tujuan, Waltz melihat kekuatan sebagai suatu yang relatif sehingga hanya menjadi sebuah cara bagi negara. Kekuatan tidak akan menjadi relevan ketika dilihat melalui hal itu sendiri, kekuatan hanya akan menjadi relevan ketika dikomparasikan dengan kekuatan lainnya. Proses inilah yang kemudian dipercayai oleh Waltz dimana komparasi kekuatan tersebut kemudian menghasilkan distribusi kekuatan di sistem internasional (Waltz, 1979). Melalui asumsi tersebut Waltz melihat bahwa yang menjadi alasan negara bertindak bukanlah kekuatan melainkan distribusi kekuatan dan sistem internasional anarkis yang menjadi alasan negara bertindak.

Waltz beragumen bahwa fokus yang harus dimiliki negara bukanlah untuk memaksimalkan kekuatan namun untuk mempertahankan posisi negara tersebut di sistem internasional (Waltz, 1979). Neo-realisme tidak mempercayai perang yang tidak terhindarkan, baginya memaksimalkan kekuatan tidak akan ada gunanya jika tidak berkontribusi untuk keberlangsungan hidupnya (Ciftci, 2009). Selama negara kuat dapat mempertahankan posisinya di struktur internasional, jalannya dunia akan tetap mengarah positif kepada mereka (Waltz, 1979). Berbagai pengikat yang terbentuk di struktur internasional memaksa negara secara rasional untuk lebih memilih keuntungan yang relatif dibandingkan keuntungan yang multak

(Waltz, 1979). Negara tidak dapat memaksakan kehendak dirinya sendiri dan melakukan perubahan yang tajam di dalam struktur internasional karena akan berdampak pada ketidakpastian dimasa depan yang mempertaruhkan keberlangsungan hidupnya. Resiko yang terlalu besar atas keuntungan multak inilah yang dihindari oleh neo-realisme sehingga keuntungan relatif menjadi satu satunya hal yang rasional bagi sebuah negara.

Dilema keamanan seringkali digunakan untuk menjelaskan dinamika hubungan negara yang mengarah pada pecahnya peperangan ataupun pembentukan perdamaian (Tang, 2009). Dilema keamanan seringkali digunakan untuk menjelaskan peristiwa besar yang terjadi di dunia seperti, perang dunia pertama dan perang dingin (Tang, 2009). Teori dilema keamanan dan model spiral digunakan negara untuk menetapkan kebijakan yang menyangkut perpolitikan internasional mengenai perlombaan senjata, merancang perdamaian untuk konflik antar etnis, menghindari keterlibatan serta kemungkinan. Konflik yang terjadi dengan Tiongkok sebagai negara *rise power* dengan Amerika Serikat sebagai pemegang hegemoni (Tang, 2009).

Herbert Butterfield memiliki asumsi bahwa dilema keamanan dapat mendorong negara-negara berperang walaupun negara mungkin tidak ingin saling menyakiti: “Perang terbesar dalam sejarah dapat dihasilkan tanpa campur tangan penjahat besar mana pun yang berniat untuk merusak dunia, perang dapat dihasilkan bahkan oleh dua kekuatan yang keduanya sangat ingin menghindari konflik” (Butterfield, 1951). Ia menyatakan bahwa terdapat enam faktor terbentuknya dilema keamanan yaitu, ketakutan menjadi sumber utama, ketidakpastian atas niatan orang lain, sifatnya tidak disengaja, menghasilkan hal yang tragis, diperparah oleh faktor psikologis dan sebagai penyebab mendasar bagi semua konflik manusia (Butterfield, 1951).

Pada penelitian milik John Herz, ia menguraikan definisi dilema keamanan menjadi: “Kelompok dan individu yang hidup berdampingan satu sama lain tanpa diorganisasikan ke dalam kesatuan yang lebih tinggi, akan/harus khawatir tentang keamanan mereka sendiri dari serangan, sasaran, dominasi atau pemusnahan oleh kelompok dan individu lain. Perjuangan untuk mendapatkan keamanan dari ancaman tersebut, mereka mendorong diri

untuk mendapatkan kekuatan lebih kuat sehingga menghindari pengaruh kekuatan lain, namun hal tersebut akan juga membuat yang lain lebih tidak aman dan melakukan hal yang sama. Karena tidak ada negara yang dapat merasa aman sepenuhnya, persaingan kekuasaan terjadi dan akumulasi kekuasaan terus berlanjut” (Herz H, 1951). Herz kemudian menegaskan bahwa ketidakpastian dan kecemasan negara terhadap niat tetangganya menjadi dasar atas terbentuknya keamanan dilema, terdapat naluri bertahan diri yang hidup di manusia. Dirinya menjelaskan enam aspek dilema keamanan yaitu: anarki atau kurangnya pemegang kekuasaan yang lebih tinggi, ketidakpastian dan ketakutan negara tentang niatan satu sama lain menjadi penyebab dilema keamanan, negara cenderung berusaha melepaskan diri dari dilema keamanan dengan mengumpulkan lebih banyak kekuatan yang menghasilkan siklus persaingan kekuasaan, negara yang meningkatkan kekuatan dirinya terkadang dapat merugikan dirinya sendiri (*self defeating*), keamanan dilema penyebab sebagai salah satu penyebab peperangan dan dinamika dilema keamanan adalah upaya memperkuat diri sendiri.

Sedangkan pada penelitian Robert Jervis dirinya mendefinisikan dilema keamanan sebagai “Tindakan yang tidak disengaja dan tidak diinginkan sebagai konsekuensi atas aksi yang sebenarnya dilakukan untuk menjadi defensif”. Poin utama keamanan dilema ialah kenaikan keamanan sebuah negara satu menurunkan keamanan negara lainnya, bukan akibat kesalahan persepsi namun anarki (Jervis, 1976). Dirinya menyebutkan bahwa bahkan ketika negara telah yakin terhadap intensi negara lain, mereka bisa tidak melepaskan kemungkinan dimana negara lain akan menjadi agresif di masa depan ataupun dirinya sendiri akan tetap memiliki tujuan damai (Jervis, 2001). Jervis mengasumsikan terdapat tujuh aspek perihal dilema keamanan yaitu, dilema keamanan didasari oleh faktor struktural, ketidakpastian dan ketakutan negara terkait niat negara lain memainkan perang terhadap dilema keamanan yang terjadi, disebabkan oleh tindakan defensif sehingga dampak tragis tidak disengaja, cenderung menghasilkan hal yang merugikan dan merusak diri sendiri, cenderung menghasilkan perang yang tidak diinginkan, dilema keamanan dapat menyebabkan perang namun bukan penyebab semua

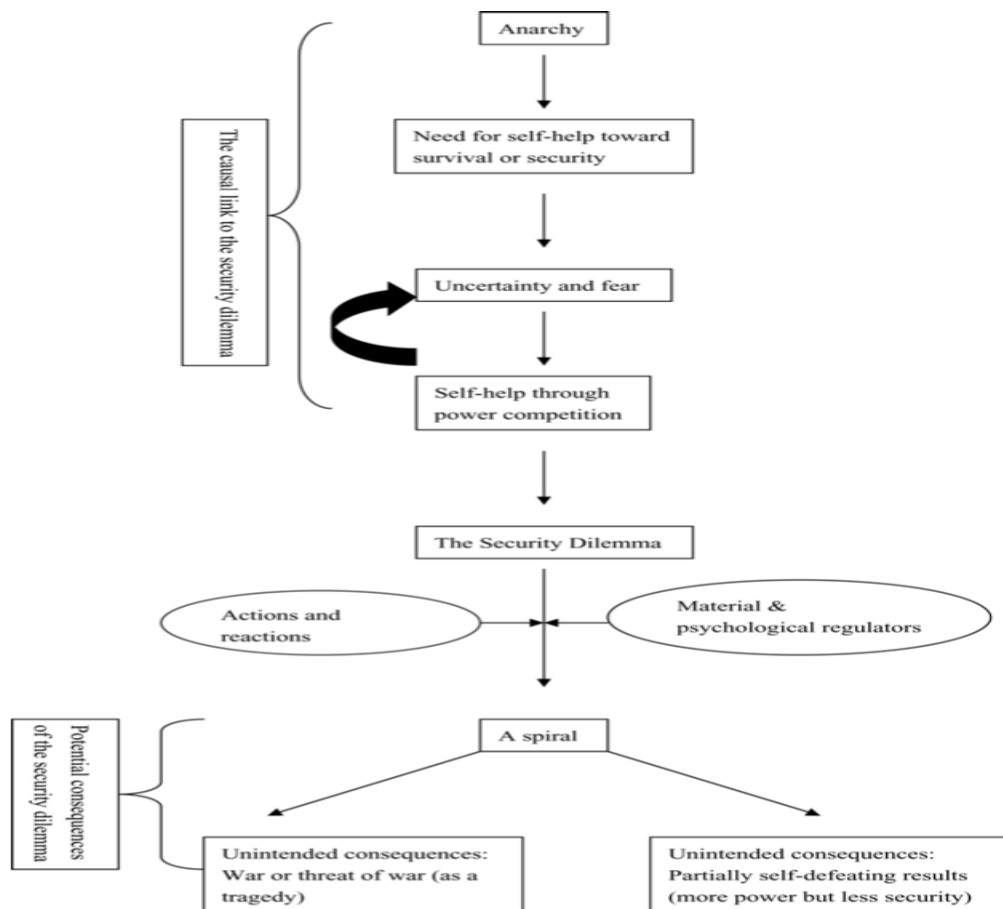
perang, dinamika keamanan dilema adalah penguatan diri dan membentuk sebuah spiral (Jervis, 1978).

Aspects of the Security Dilemma	Butterfield (1951, 1960)	Herz (1950, 1951, 1966)	Jervis (1976, 1978, 1982, 1999, 2001)
The ultimate source is anarchy	No	Yes	Yes
Uncertainty over others' intentions	Yes	Yes	Yes
Fear about each other	Yes	Yes	Yes
Lack of malign intentions	Yes, but inconsistent	Yes	Yes, but inconsistent
Power competition	Not explicit	Yes	Yes
Spiral-like situation	Not explicit	Yes	Yes
Unintended tragic results	Yes	Yes	Yes
Unintended (and partially) self-defeating results	Not explicit	Yes	Yes
Regulators of the security dilemma	Only psychological factors were emphasized	Not emphasized	Both material and psychological factors were emphasized
Universal or conditional	Universal	Conditional	Conditional
An important cause of war?	Yes	Yes	Not explicit, although close to a Yes
The cause of all wars?	Yes	No	No

Gambar 3. Dilema Keamanan menurut Butterfield Herz dan Jervis

Sumber: Tang, 2009

Tabel di atas merupakan elaborasi dilema keamanan dari penelitian Shiping Tang dalam jurnalnya yang berjudul *The Security Dilema: A Conceptual Anaylisis*. Elaborasi tersebut merupakan rangkuman terkait pengertian dan perbedaan keamanan dilema yang diberikan oleh Herbert Butterfield, John Herz dan Robert Jervis yang ia sebut dengan bhj formula. Melalui elaborasi tersebut, ia kemudian merangkai definisi keamanan dilema sebagai hal yang terjadi dibawah kondisi yang anarki dimana negara tidak bermaksud mengancam keamanan satu sama lain namun di sisi lain juga tidak dapat memastikan niat negara lain untuk masa kini dan masa depan sehingga saling memperkuat kekuasaan untuk kekuatan atas dasar rasa takut (Tang, 2009). Gambar di bawah memperlihatkan bagaimana hubungan kausal antara anarki, dilema keamanan dan perang.



Gambar 4. Hubungan Kausal Dilema Keamanan dan Perang
Sumber: Tang, 2009

Penulis akan menggunakan teori dilema keamanan sebagai alat analisis dalam melihat kondisi Tiongkok di LTS. Menggunakan kerangka model penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis akan terlebih dahulu menganalisis dilema keamanan yang terjadi terhadap hubungan antara Tiongkok dengan Vietnam dan Filipina di LTS. Kemudian dengan dasar dasar asumsi yang telah dipaparkan, penulis akan melihat bagaimana upaya Tiongkok dalam menangani dilema keamanan di LTS.

2.2.2 *Defense – Offense Differentiation* dan *Defense – Offense Advantage*

Robert Jervis menganalisa bahwa kondisi dilema keamanan dapat diperparah ataupun diperbaiki melalui beberapa faktor, dua faktor yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan memainkan perang terhadap dilema keamanan yang terjadi ialah keuntungan defensif/ofensif dan diferensiasi defensif/ofensif.

a. *Offense – Defense Advantage*

Merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana penilaian negara atas suatu keuntungan untuk bertindak defensif maupun ofensif mampu berperan untuk mengubah dilema keamanan yang terjadi. Jervis menyatakan bahwa ketika ketika kondisi ofensif memiliki keuntungan, negara lebih dimudahkan untuk menyerang pasukan musuh dan mengambil sebuah wilayah dibandingkan untuk mempertahankan wilayahnya sendiri (Jervis, 1978). Dalam kondisi dunia dimana komitmen, strategi dan teknologi dikembangkan untuk mengejar keamanan melalui ekspansi, resiko adanya peperangan yang tidak diinginkan sebagai efek spiral dilema keamanan menjadi hal yang lumrah. Di sisi lain, keuntungan defensif diartikan bahwa akan lebih diuntungkan bagi negara untuk bertahan daripada dirinya mengekspansi wilayah negara lain. Dalam kondisi ini, negara status quo memiliki ruang dan pilihan kebijakan yang lebih luas dalam merespon dilema keamanan. Pada situasi ini, negara cenderung tidak akan menyerang namun akan memperkuat pertahanannya sendiri, masing-masing negara yang memahami kalkulasi tersebut dapat melakukannya secara bersamaan tanpa mengganggu keamanan negara lainnya (Jervis, 1978). Keuntungan defensif menyebabkan kebuntuan dalam peperangan, hal tersebut kemudian berdampak pada harga yang besar atas penyerangan tersebut. Keadaan yang menguntungkan pihak yang bertindak defensif seringkali dimanfaatkan oleh negara yang lebih lemah secara, dimana dirinya dapat menahan lebih lama dan menyebabkan beban penyerbuan lebih dari yang disanggupi oleh negara penyerang (Jervis, 1978). Pada perang dunia pertama, kekuatan negara-negara eropa yang menilai bahwa mereka memiliki keuntungan ofensif berakhir kesalahan kalkulasi dimana parit dan senapan mesin memberikan keuntungan yang besar untuk bertindak defensif menghasilkan jalan buntu serta perang yang berlarut larut sebagai dampak atas kesalahan kalkulasi dilema keamanan yang terjadi (Jervis, 1978).

b. *Offense Defense Differentiation*

Merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana setiap negara yang berada dalam dilema keamanan dapat berupaya untuk melakukan pembedaan tindakan negara lain. Mengasumsikan bahwa upaya diferensiasi yang dilakukan negara atas tindakan negara lain antara apakah negara tersebut bertindak defensif atau ofensif dapat memberikan pilihan kebijakan yang berdampak pada dilema keamanan yang terjadi. Ketidakpastian menjadi hal yang terjadi pada sistem yang anarki oleh negara sehingga diferensiasi bukan berguna untuk menghilangkan keseluruhan dilema keamanan, namun upaya pembedaan dan penentuan niatan negara lain setidaknya memberikan ruang bagi membaiknya dilema keamanan (Jervis, 1978). Ketika bersifat ofensif memiliki keuntungan, agresi dan penyerangan akan memungkinkan. Ketidamampuan negara untuk mendiferensiasi tindakan negara lain akan memperparah dan menaikkan posibilitas untuk penyerangan terjadi baik dimulai dari dirinya yang tidak ingin menunggu untuk diserang ataupun dimulai oleh negara lain. Keuntungan ofensif juga akan selalu memberikan negara ketidakpastian dikarenakan negara yang bersikap damai mungkin bisa menyerang di masa depan. Negara status quo akan lebih memiliki ruang gerak ketika keuntungan defensif memiliki keuntungan, hal ini dikarenakan negara status quo akan memiliki pergerakan yang berbeda dari negara eskpansionis. Dalam upaya mendiferensiasi tindakan negara lain, negara status quo dapat saling memberikan sinyal atas sikapnya yang defensif lalu, membentuk pondasi kerja sama untuk mengurangi dilema keamanan yang terjadi. Mereka juga mendapatkan lebih banyak waktu untuk mendiferensiasi perilaku dari negara lain. Ketika negara lain memiliki niatan untuk mengagresi, negara status quo dapat melihat persiapan yang dilakukan seperti peluncuran militer dan pergerakan negara tersebut (Jervis, 1978). Observasi yang dilakukan negara status quo dalam kondisi keuntungan defensif dapat dilakukan secara lebih mendalam bukan hanya melalui serangan atau tindakan pertama negara lain. Diferensiasi yang dilihat melalui persenjataan sebuah negara

memiliki kemungkinan yang kecil untuk berhasil, hal ini dikarenakan bahwa bahkan negara status quo menginginkan senjata ofensif untuk melindungi dirinya. Alasan lainnya ialah terkadang persenjataan memiliki tujuan sesuai dengan apa yang diinginkan negara, senjata defensif dapat dijadikan senjata ofensif begitupun sebaliknya. Sehingga upaya terbaik dalam melakukan diferensiasi adalah dengan berusaha mengobservasi intensi sesungguhnya atas tindakan negara lain (Jervis, 1978).

Jervis kemudian menggabungkan kedua variabel di atas kedalam model penelitian yang dapat menghasilkan empat kemungkinan dunia (Jervis, 1978) sebagai berikut:

1. Dunia pertama menjadi dunia yang paling buruk bagi negara status quo dikarenakan bahwa negara tersebut dituntut untuk melakukan upaya peningkatan keamanannya yang bisa saja mencelakai dirinya sendiri atau menyebabkan perang yang tidak diinginkan. Kondisi di mana lebih menguntungkan untuk menyerang serta ketidakmampuan negara untuk mendiferensiasi perilaku negara lain menghasilkan kondisi yang tidak stabil karena masing-masing negara akan melakukan perlombaan senjata dan kemungkinan terjadinya efek spiral dilema keamanan atau perang akan terus menerus membesar.
2. Dunia kedua merupakan dunia dimana dilema keamanan terjadi dan negara memiliki ruang bergerak yang lebih banyak dibandingkan pada dunia pertama. Dikarenakan bahwa meskipun negara belum bisa mendiferensiasi tindakan negara lain, kondisi yang menguntungkan ketika negara bertindak defensif akan memberikan kesempatan bagi negara status quo bereaksi dengan perlahan atas tindakan negara lain dan berupaya memberikan sinyal atas sifat defensif dirinya sendiri ke negara lain. Pada kondisi ini, negara satu sama lain akan tetap menginginkan berbagai persyaratan atas keamanan dirinya. Negara yang meningkatkan kapabilitas militernya bukan berarti dapat dikatakan negara ekspansionis, terdapat kemungkinan bahwa negara tersebut merupakan negara yang merasa tidak aman yang mana ketika dirinya

merasa terserang akan menkonfrontasi hal yang sama namun akan mengurangi kapabilitas militernya ketika negara saling mereda, sehingga dibutuhkan rasa empati serta kenegarawan yang terampil untuk berupaya menjelaskan situasi yang terjadi satu sama lainnya.

3. Dunia ketiga, tidak ada dilema keamanan melainkan adanya masalah keamanan. Negara dapat mendiferensiasi tindakan negara lain serta kondisi yang menguntungkan bagi negara yang menyerang akan selalu memberikan kemungkinan untuk diserang. Negara satu sama lain harus saling mengawasi dan akan selalu ada ruang bagi kecurigaan palsu yang menghasilkan ketidakpercayaan, keterikatan dan perang.
4. Dunia keempat merupakan dunia yang paling stabil bagi Jervis. Diferensiasi yang dapat dilakukan oleh negara serta kondisi yang menguntungkan bagi tindakan defensif tidak memberikan negara satu dan lainnya untuk mendapatkan kapabilitas militer yang dapat dinilai agresif bagi negara lainnya. Upaya peningkatan kapabilitas militer bahkan ketika dirinya memahami negara lain sebagai negara status quo hanya akan merusak dan memulai kecurigaan oleh negara lain.

Penelitian ini akan menggunakan variabel yang dibentuk oleh Jervis untuk menganalisis kondisi seperti apa yang menguntungkan (defensif atau ofensif) bagi Tiongkok di LTS serta mencoba melakukan diferensiasi tindakan Tiongkok melalui kebijakan inkonsistensinya terhadap Vietnam dan Filipina. Setelahnya penelitian ini akan menjelaskan keempat kemungkinan dunia yang terjadi atas hasil analisa kedua variabel sehingga dapat menghasilkan jawaban atas pertanyaan penelitian.

2.2.3 Peaceful Development

Diperkenalkan oleh Tiongkok sebagai konsep, *peaceful development* merupakan upaya Tiongkok untuk memberikan keyakinan terhadap negara lain bahwa perkembangan dirinya akan dilakukan secara damai dan tidak menyakiti negara lain (Hu, 2005). Pada tahun 2011, melalui rilisnya buku putih mengenai *peacefull development*, Tiongkok secara resmi menyebutkan *peaceful development* sebagai pilihan strategiknya. Terdapat lima konten yang

dijelaskan secara runtun terkait pandangan Tiongkok terhadap *peaceful development* yaitu:

a. *The Path of China's Peaceful Development: What It Is About*

Konten pertama menjelaskan pemahaman terkait *peaceful development* sebagai langkah yang diambil Tiongkok terhadap dunia internasional. Tiongkok mendefinisikan *peaceful development* sebagai acuan bagi perkembangan dirinya dimana dalam proses perkembangannya sebagai negara, dirinya harus berkontribusi dan menjunjung tinggi perdamaian dunia. Tiongkok akan bertumpu pada dirinya sendiri dan di saat yang bersamaan akan membuka diri untuk belajar dari negara lain. Tiongkok akan mencari keuntungan bersama dan bekerja sama dengan negara lain untuk membangun dunia yang harmonis.

b. *What China Aims to Achieve by Pursuing Peaceful Development*

Konten kedua menjelaskan tujuan yang ingin dicapai oleh Tiongkok melalui *peaceful development*. Secara menyeluruh tujuan dari *peaceful development* ialah untuk mempromosikan pembangunan dan harmoni di dalam negeri dan mengejar kerja sama serta perdamaian di level internasional melalui akselerasi dalam perubahan model pertumbuhan, pembentukan masyarakat yang harmonis, mendorong sumber daya domestik, mengimplementasikan strategi keterbukaan yang memberikan keuntungan bersama, dan untuk membentuk kondisi eksternal yang menguntungkan secara damai

c. *China's Foreign Policies for Pursuing Peaceful Development*

Konten ketiga menjelaskan secara mendalam bagaimana *peaceful development* akan terimplementasikan di dalam setiap kebijakan luar negeri Tiongkok yaitu:

1. Mempromosikan pembangunan dunia yang harmonis

a. Politik

Negara-negara harus saling menghormati dan memperlakukan satu sama lain secara setara. Menjaga peran inti PBB dalam menangani urusan global, mematuhi tujuan, prinsip dan hukum

internasional yang berlaku untuk mengatur hubungan internasional.

b. Ekonomi

Negara-negara harus bekerja sama, memanfaatkan kekuatan satu sama lain dan membentuk ekonomi global yang seimbang dan saling menguntungkan seluruh negara.

c. Budaya

Negara harus memanfaatkan kekuatan satu sama lain, mencari kesamaan sambil mengesampingkan perbedaan, menghormati keragaman dan memiliki tujuan untuk kemajuan dalam peradaban manusia

d. Keamanan

Negara harus saling percaya dan memperkuat kerja sama, menyelesaikan perselisihan dan konflik internasional secara damai tanpa menggunakan cara-cara seperti ancaman kekuatan militer demi menjaga stabilitas dunia.

e. Lingkungan

Semua negara harus saling membantu dan melakukan upaya bersama dalam melindungi satu satunya rumah kita yaitu bumi. Pengembangan mode pembangunan baru dan berkelanjutan serta mempromosikan pembangunan yang harmonis antara manusia dan alam.

2. Mengejar kebijakan luar negeri yang independen

Tiongkok mempromosikan hubungan persahabatan dan kerja sama dengan negara lain berdasarkan Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai. Ia tidak akan membentuk aliansi dengan negara dan kelompok negara lain, tidak menggunakan ideologi sebagai tolak ukur dalam menentukan hubungan dengan negara lain serta menghormati hak rakyat negara lain untuk secara mandiri menentukan pembangunan negaranya.

3. Mempromosikan pemikiran baru tentang keamanan yang mengedepankan rasa saling percaya, saling menguntungkan, kesetaraan dan koordinasi.

Tiongkok menganjurkan pemikiran baru mengenai keamanan bersama. Baginya, semua negara berbagi kepentingan bersama di era globalisasi ekonomi. Komunitas internasional harus meningkatkan kesadaran akan keamanan bersama. Negara harus menghormati masalah keamanan orang lain dan penting untuk memberikan peran penuh pada PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

4. Secara aktif menjalankan tanggung jawab internasional

Tiongkok mematuhi hukum internasional dan dengan penuh semangat memenuhi tanggung jawab internasional. Tiongkok telah berpartisipasi aktif dalam mereformasi sistem internasional, merumuskan aturan internasional, dan menangani masalah global. Seluruh negara harus memainkan peran yang konstruktif dengan memenuhi tanggung jawab internasional mereka sesuai dengan kemampuan negara tersebut.

5. Mempromosikan kerjasama regional dan hubungan *good-neighborly*

Tiongkok secara aktif meningkatkan kerja sama yang bersahabat dengan negara tetangga dan mempromosikan Asia yang harmonis. Tiongkok menyerukan kepada seluruh negara di kawasan Asia untuk saling menghormati satu sama lain, meningkatkan rasa saling percaya, mencari kesamaan sambil mengesampingkan perbedaan, menjaga perdamaian dan menyelesaikan perselisihan melalui dialog dan negosiasi bersahabat. Perdagangan dan kerja sama yang saling menguntungkan perlu ditingkatkan demi mempromosikan integrasi ekonomi regional.

- d. *China's Path of Peaceful Development Is a Choice Necessitated by History*

Konten keempat menjelaskan bagaimana *peaceful development* menjadi pilihan diperlukan bagi Tiongkok. Merupakan pilihan yang strategik dikarenakan *peaceful development* dinilai membawa tradisi historis dan kultural masyarakat Tiongkok yang harmonis, sesuai dengan kondisi nasional Tiongkok serta sebagai pilihan yang merepresentasikan tren dunia yang bergerak ke arah globalisasi yang membuka peluang perdamaian serta perkembangan

e. *What China's Peaceful Development Means to the Rest of the World*

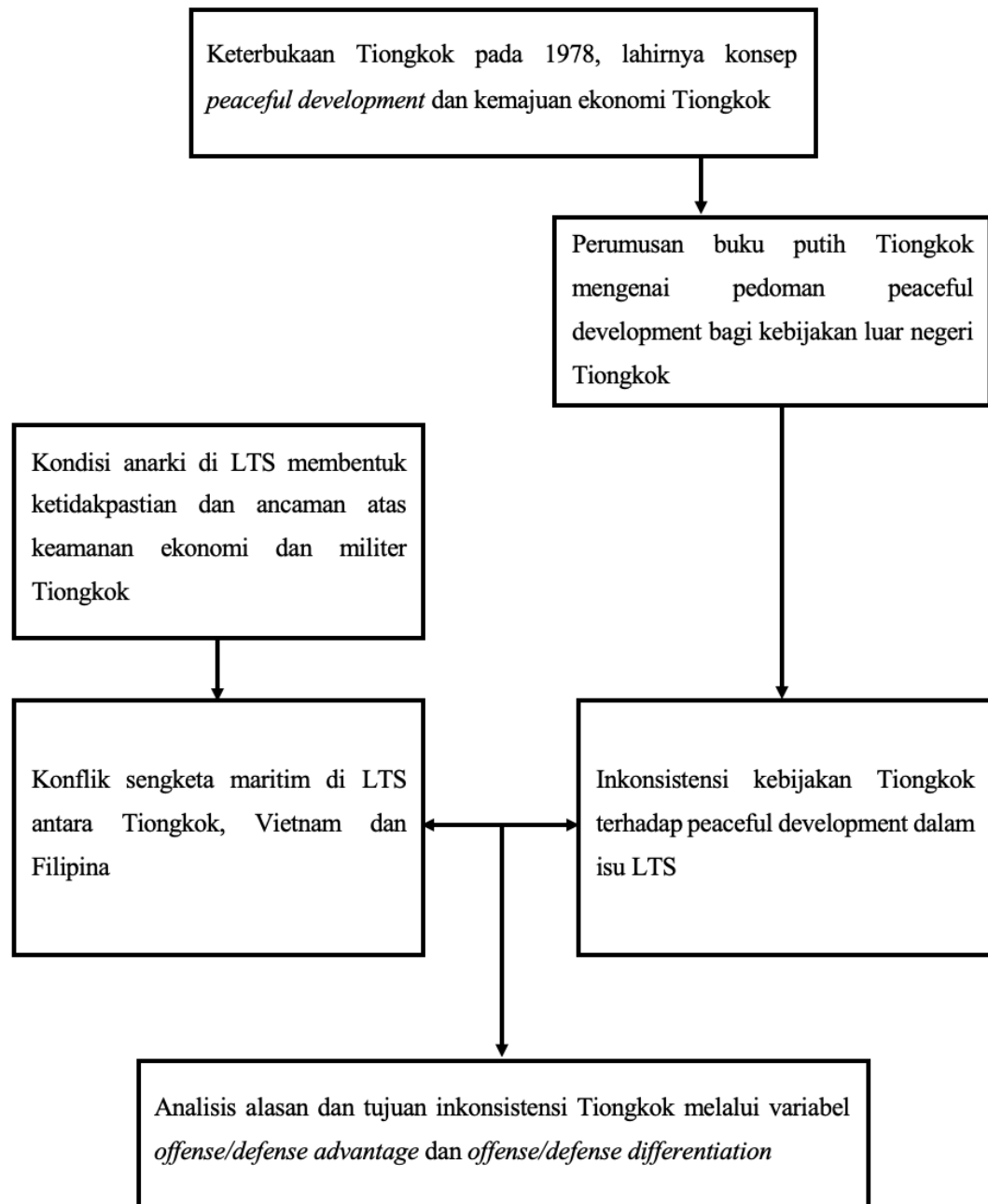
Konten kelima menekankan bagaimana *peaceful development* menjadi sebuah pilihan yang damai yang berdampak positif bagi dunia internasional. Tiongkok menilai dirinya telah menghentikan siklus tradisional dimana negara *rising* cenderung mengejar hegemoni, melalui *peaceful development* Tiongkok memfokuskan diri untuk mengejar keuntungan bersama. Perdamaian, Tiongkok dan dunia internasional menjadi hal yang saling berkaitan dimana Tiongkok tidak dapat berkembang dengan menutup diri dan di saat yang bersamaan perdamaian dunia tidak dapat dipertahankan tanpa adanya *peaceful development*

Konsep *peaceful development* milik Tiongkok akan digunakan untuk menjadi dasar analisis kekonsistenan berbagai kebijakan serta tindakan Tiongkok. Melalui poin ketiga "*China's Foreign Policies for Pursuing Peaceful Development*" penulis akan menganalisis keselarasan berbagai peristiwa utama dan kebijakan yang dilakukan Tiongkok di LTS sehingga menghasilkan konklusi atas inkonsistensi Tiongkok di LTS.

2.3 Kerangka Pemikiran

Keterbukaan Tiongkok pada 1978 mengawali pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang masif untuk 40 tahun kedepan. Hasil tersebut tidak terlepas dari upaya dirinya memperkenalkan dirinya sebagai negara yang damai melalui konsep *peaceful development*. Pada tahun 2011 Tiongkok secara resmi memperkenalkan konsep sebagai pilihan strategiknya, *peaceful development* didefinisikan sebagai upaya perkembangan Tiongkok menjunjung tinggi perdamaian dunia dan akan berkontribusi terhadap stabilitas dunia melalui berbagai usaha kolektif yang

memberikan dunia yang harmonis, perdamaian yang bertahan lama dan keuntungan bersama (State Council Information Office, 2011). Namun kondisi yang anarki di LTS membentuk ketidakpastian dan ancaman atas keamanan ekonomi dan militer Tiongkok sehingga pada kepemimpinan presiden Xi, Tiongkok dinilai lebih proaktif dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Atas benturan tersebut terjadi inkonsistensi kebijakan yang dilakukan Tiongkok terhadap Vietnam dan Filipina sebagai negara klaiman. Penelitian ini akan menjelaskan strategi yang dilakukan Tiongkok di LTS melalui inkonsistensi *peaceful development* terhadap Vietnam dan Filipina.



Gambar 5. Kerangka Pemikiran
Sumber: Karya Penulis

III. METODE PENELITIAN

Bab ini akan memaparkan jenis dan fokus penelitian, jenis dan sumber data serta teknik pemilihan dan analisis data. Bab ini akan memberikan gambaran secara menyeluruh terkait bagaimana penelitian ini akan menghasilkan jawaban atas pertanyaan penelitian.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan diselesaikan dengan menggunakan logika kualitatif. Penelitian melalui proses kualitatif digunakan dalam pendekatan ilmu sosial ketika data kuantitatif tidak dapat dinilai dan digunakan (Bryman, 2012). Penelitian kualitatif melihat suatu fenomena sosial yang terjadi sebagai hasil dari interaksi kompleks antar individu maupun kelompok. Melalui penelitian kualitatif, kesimpulan dan hasil yang ditarik akan berupa pengumpulan data dan analisis. Sehingga metode ini akan menekankan pada metode yang bersifat konstruktif dan interpretatif (Bryman, 2012). Penelitian ini juga akan berwujud sebagai penelitian *explanatory* yang dapat memberikan penjelasan atau prediksi terhadap suatu kasus melalui proses elaborasi antara data dengan fakta dan konsep.

Jenis penelitian kualitatif dinilai relevan dan dapat menjelaskan permasalahan mendasar atas penelitian ini yaitu adalah adanya inkonsistensi atas sikap Tiongkok sebagai negara dengan pertumbuhan kekuatan yang sangat cepat. Keambiguan sikap tersebut merupakan permasalahan sosial yang mana menimbulkan banyak spekulasi atas arah kebijakan luar negeri yang akan diambil Tiongkok. Penelitian ini nantinya akan menyajikan data dalam bentuk *explanatory* karena akan berfokus pada pemaparan kebijakan inkonsisten Tiongkok di LTS dan terhadap Vietnam Filipina. Data tersebut akan dijadikan bahan penelitian terkait pertanyaan penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian difokuskan untuk melihat alasan atas inkonsistensi Tiongkok terhadap *peaceful development* dalam isu LTS. Penelitian akan berfokus untuk mengintrepetasikan keselarasan pedoman *peaceful development* dengan berbagai tindakan Tiongkok yang berhubungan langsung dengan LTS, Vietnam serta Filipina. Setelahnya, hasil tersebut akan dianalisis secara konseptual dengan variabel keuntungan defensif / ofensif dan diferensiasi defensif / ofensif milik Robert Jervis untuk menghasilkan jawaban penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif sekunder berbentuk seperti buku, jurnal dan situs web resmi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan fokus dan topik penelitian. Penelitian ini secara umum akan memerlukan dua fokus data yaitu data intrepetasi kepentingan nasional Tiongkok serta data implementasi kebijakannya terhadap LTS, Vietnam dan Filipina. Penulis akan menggunakan berbagai jurnal penelitian terdahulu, situs resmi pemerintah, dan pernyataan elite politik yang memproyeksikan kepentingan nasional Tiongkok di LTS serta menggunakan beberapa situs seperti *Council on Foreign Relations*, *Asia Maritime Transparency Initiative* dan *International Crisis Group* untuk mengumpulkan data peristiwa di LTS. Kemudian Penulis akan menggunakan berbagai jurnal penelitian terdahulu untuk mendeskripsikan kepentingan nasional Tiongkok di Vietnam dan Filipina menggunakan data seperti laporan tahunan *National Institute for Defense Studies* (NIDS) “*China Security Report 2019: China’s Strategy for Reshaping the Asian Order and Its Ramifications*” dan situs resmi pemerintah untuk mengumpulkan data implementasi *peaceful development* Tiongkok terhadap Vietnam dan Filipina.

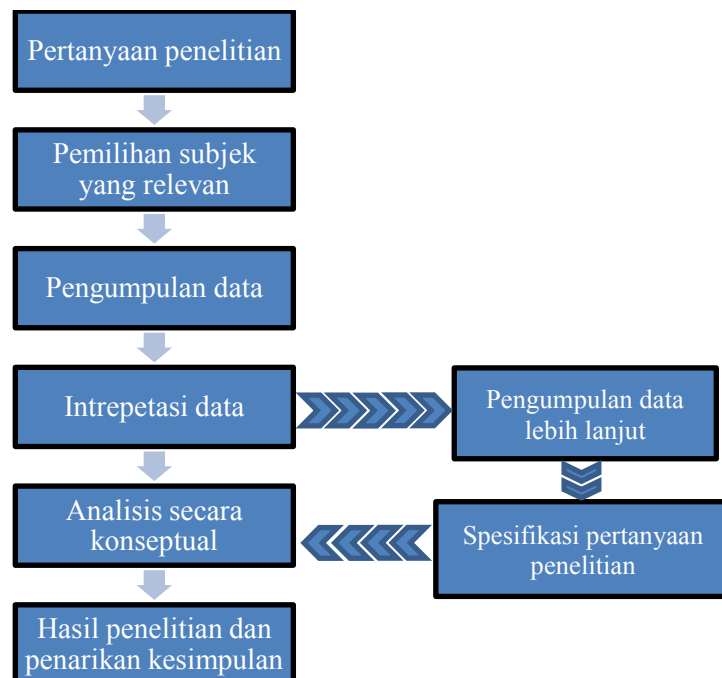
3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian *undirect*, atas dasar tersebut teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi Pustaka. Data akan dikumpulkan melalui berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan tahunan, berita dan situs web resmi pemerintah yang berkaitan dengan fokus dan

topik penelitian ini seperti laporan dari pemerintah Tiongkok, Vietnam, Filipina, UNCLOS dan ASEAN. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis sesuai dengan konsep dan teknik analisis yang telah ditentukan.

3.5 Teknik Analisis Data

Proses penelitian ini akan menggunakan enam langkah utama dalam penelitian kualitatif sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Bryman, 2012), pertanyaan penelitian merupakan pertanyaan mendasar mengenai orientasi dan arah penelitian, poin utama dalam pertanyaan penelitian adalah apa yang ingin diketahui oleh penulis serta urgensi dalam mendapatkan jawaban atas penelitian tersebut. Setelahnya, peneliti akan memilih subjek penelitian yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Lalu, subjek penelitian yang telah dipilih menghasilkan sebuah data yang kemudian diintrepetasikan menggunakan konsep dan teori yang telah dipilih sehingga menjadi hasil penelitian dalam tulisan tersebut. Jika dalam proses intepretasi peneliti menemukan adanya keraguan serta pertanyaan yang lebih spesifik, peneliti akan melakukan proses pengumpulan data lebih lanjut dan mengulang proses intrepetasi dan menjadikannya hasil akhir penelitian.



Gambar 6. Teknik Analisis Data Kualitatif
Sumber: Bryman, 2012

V. SIMPULAN & SARAN

Bab ini akan merangkum penelitian secara menyeluruh dan memberikan hasil serta kesimpulan atas penelitian berdasarkan proses elaborasi dan analisis data yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini juga akan memberikan saran yang merupakan argumen penulis didasarkan oleh hasil penelitian yang telah dilakukan.

5.1 Simpulan

Dalam kurun waktu 40 tahun, Tiongkok telah berubah dari negara yang sangat miskin menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua setelah Amerika di dunia. Hasil tersebut tidak terlepas dari upaya memperkenalkan dirinya sebagai negara yang damai melalui konsep *peaceful development* yang menekankan bahwa pertumbuhan Tiongkok tidak akan menjadi ancaman bagi negara lain alih alih melayani perdamaian, stabilitas dan kemakmuran bersama di dunia (Hu, 2005). Tiongkok memperkenalkan secara resmi *peaceful development* sebagai pilihan strategik Tiongkok melalui buku putih yang diterbitkan pada tahun 2011, kembali menekankan hal yang sama dengan konsep yang telah dijalankan sejak 1980 (State Council Information Office, 2011).

Pada kepemimpinan Xi Jinping, banyak penelitian yang menilai bahwa Tiongkok lebih proaktif di level internasional, tak jarang kebijakan yang dilakukan Tiongkok disebut sebagai kebijakan yang asertif. LTS menjadi salah satu arena kebijakan Tiongkok yang dinilai menimbulkan ancaman bagi negara pesisir LTS seperti Vietnam dan Filipina. Penulis melihat terdapat inkonsistensi kebijakan Tiongkok dengan *peaceful development* sehingga penelitian ini berusaha untuk menganalisa strategi Tiongkok melalui inkonsistensinya terhadap *peaceful development* dalam isu LTS. Dalam menjawab pertanyaan tersebut penelitian ini melihat berbagai peristiwa utama dan kebijakan Tiongkok di LTS.

Reklamasi laut pada tahun 2013-2015, peningkatan fasilitas di pulau buatan dan pembentukan komponen militer yang kompleks serta berbagai eskalasi yang terjadi dengan Vietnam dan Filipina berdampak pada meningkatkan persepsi

ancaman negara lain terkhususnya Vietnam dan Filipina, memperkeruh konflik maritim, merusak stabilitas yang ada di LTS. Hal tersebut berlawanan dengan pedoman *peaceful development* yang mengatakan bahwa kebijakan luar negeri Tiongkok akan bertujuan untuk membangun dunia yang harmonis dan membentuk rasa saling percaya serta keamanan bersama. Pada saat yang bersamaan Tiongkok juga melakukan beberapa kebijakan yang selaras dengan pedoman *peaceful development* seperti berupaya membuka jalur komunikasi terhadap setiap eskalasi yang terjadi. Penggunaan militer di LTS juga dilakukan secara terbatas dengan menggunakan taktik zona abu-abu yang memperkecil resiko eskalasi parah. Secara resmi Tiongkok dan Filipina juga membentuk mekanisme konsultasi bilateral yang menghasilkan kerjasama dalam sektor perikanan dan minyak di area sengketa.

Inkonsistensi dan sikap terbatas Tiongkok dalam menangani setiap eskalasi yang terjadi memperlihatkan dirinya yang berada dalam kondisi dilema keamanan di LTS. Ketakutan Tiongkok terhadap kerentanan ekonomi serta militernya di LTS memaksa Tiongkok untuk selalu waspada dan menolong dirinya sendiri, hal ini dilakukan Tiongkok dengan melaksanakan reklamasi pulau serta peningkatan kapabilitas di pulau pulau tersebut. Upaya tersebut secara langsung bersinggungan dengan keamanan Vietnam maupun Filipina yang merespon tindakan yang sama sehingga mengaktivasi dilema keamanan sehingga berbagai kebijakan lanjutan yang dilakukan Tiongkok mengharuskan dirinya untuk mempertimbangkan resiko dilema keamanan yang dapat memburuk. Terdapat beberapa faktor yang dapat memperbaiki maupun memperburuk dilema keamanan yang terjadi. Menurut Robert Jervis, penilaian keuntungan untuk bertindak defensif maupun ofensif dan keberhasilan negara mendiferensiasi tindakan negara lain memiliki peran di dalam dilema keamanan (Jervis, 1978). Penelitian ini menganalisis bahwa bertindak defensif lebih memiliki keuntungan bagi Tiongkok, dikarenakan bahwa upaya agresi terhadap 80% LTS akan membawa konflik langsung tidak hanya dengan Vietnam dan Filipina namun seluruh negara klaiman, perang yang dihasilkan oleh sikap ofensif akan berkontradiksi dengan tujuan Tiongkok di LTS yaitu mengamankan jalur perdagangan serta menjadikan LTS sebagai buffer zone bagi ancaman di masa yang akan datang. Sedangkan pada variabel diferensiasi defensif dan ofensif, penulis menganalisis bahwa pada dasarnya Tiongkok memiliki sikap

yang defensif, dirinya terus berupaya memberikan sinyal bahwa setiap tindakannya di LTS didasarkan atas alasan keamanan nasional tanpa berupaya untuk mengagresi negara lain seperti dengan terus membangun jalur komunikasi pada setiap eskalasi, tidak menggunakan kekuatan militer secara penuh, tidak memperparah eskalasi konflik yang telah terjadi, tidak memaksakan hasil yang diinginkan oleh Tiongkok atas setiap insiden yang terjadi, tidak melakukan reklamasi laut tambahan untuk menambah kontrol atas area LTS serta mencari persamaan dan membangun kerjasama di area sengketa.

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa, berbagai inkonsistensi Tiongkok terhadap *peaceful development* yang dilakukan dalam isu LTS terjadi dikarenakan Tiongkok yang terjebak dalam dilema keamanan bersama Vietnam dan Filipina. Hasil analisa memperlihatkan bahwa Inkonsistensi yang dilakukan Tiongkok di LTS bertujuan untuk mengeliminasi dampak spiral dari dilema keamanan. Melalui inkonsistensi tersebut Tiongkok terus memperlihatkan bagaimana dirinya hanya berfokus terhadap keamanan dirinya sendiri dan memiliki sifat alami yang defensif. Ketika Tiongkok berhasil memberikan kepastian atas sikap alami dirinya yang defensif di LTS, ruang atas penyelesaian konflik dan komunikasi yang terjadi akan berlangsung secara lebih baik dimana masing-masing negara akan dapat lebih memahami satu sama lain. Hal ini juga dapat memberikan kesempatan bagi tercapainya kerja sama dalam ruang lingkup LTS, mempertahankan hubungan politik, memperluas kerja sama di berbagai aspek dan yang terpenting adalah mengeliminasi kemungkinan terburuk dari dilema keamanan yaitu perang yang tidak diinginkan di LTS.

5.2 Saran

Setelah melakukan analisis dan menyimpulkan strategi Tiongkok di LTS melalui inkonsistensi *peaceful development* terhadap Vietnam dan Filipina, Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Tiongkok tidak dianjurkan untuk melakukan reklamasi tambahan serta harus menghindari aktivitas yang dapat dinilai oleh Vietnam maupun Filipina melebihi batas area yang telah ada seperti pada insiden anjungan minyak *Haiyang Shiyou-981*. Hal ini dikarenakan bahwa ketika Tiongkok ingin dinilai

defensif, reklamasi pulau dan kapabilitas militer saat ini sudah cukup untuk mengamankan dan mempertahankan keamanan Tiongkok sehingga tidak ada alasan untuk melakukan reklamasi lanjutan, reklamasi lanjutan hanya akan menghancurkan kepercayaan dan memperburuk dilema keamanan.

2. Pemanfaatan pondasi hubungan politik yang sedang baik dan tenang pada saat ini harus dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk mempercepat berbagai upaya kerja sama pengembangan bersama di LTS.
3. Hasil analisis memaparkan bahwa bertindak defensif memiliki keuntungan sehingga diharapkan Tiongkok, Vietnam dan Filipina lebih mempertimbangkan secara mendalam berbagai keputusan perihal LTS. Hal ini dikarenakan bahwa mereka memiliki lebih banyak ruang untuk melihat dan menentukan respon terbaik atas tindakan satu dengan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- AFP. (2015, April 14). World should fear Beijing's claims to South China Sea, says Philippine's Aquino. *South China Morning Post*.
<https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/1766409/world-should-fear-beijings-claims-south-china-sea-says>
- American Enterprise Institute. (2023). *China Global Investment Tracker*.
<https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/?ncid=txtlnkusaolp00000618>
- AMTI CSIS. (2023). *OCCUPATION AND ISLAND BUILDING*. Diambil kembali dari The Asia Maritime Transparency Initiative and The Center for Strategic and International Studies: <https://amti.csis.org/island-tracker/>
- ASEAN Main Portal. (2020). *ASEAN-China Economic Relation*. ASEAN.
<https://asean.org/our-communities/economic-community/integration-with-global-economy/asean-china-economic-relation/>
- ASEAN Secretariat. (2021). ASEAN Investment Report 2020-2021 Investing in Industry 4.0. In *ASEAN Secretariat*.
<http://investasean.asean.org/files/upload/ASEAN%0AInvestment%0AREport%0A2020-2021.pdf>
- Asia for Educators. (2022). *CHINA—Timeline of Historical Periods*. Asia for Educators. http://afe.easia.columbia.edu/timelines/china_timeline.htm
- Asia Maritime Transparency Initiative. (2020, March 5). *The Long Patrol: Staredown at Thitu Island Enters its Sixteenth Month*. Asia Maritime Transparency Initiative. <https://amti.csis.org/the-long-patrol-staredown-at-thitu-island-enters-its-sixteenth-month/>
- Asia Maritime Transparency Initiative. (2023). *China Tracker*. Asia Maritime Transparency Initiative. <https://amti.csis.org/island-tracker/china/>
- Banlaoi, R. C. (2015). Duterte Presidency: Shift in Philippine-China Relations? In *The South China Sea Disputes* (pp. 357–361). WORLD SCIENTIFIC.
https://doi.org/doi:10.1142/9789814704984_0083
- Banlaoi, R. C. (2019). *Impacts from the philippines' "pivot" to china: costs and benefits*.

- Banlaoi, R. C. (2020). Bilateral Approach to Maritime Security Cooperation and Risk Management: Lessons Learned from Philippines-China BCM on the SCS. *Symposium on Maritime Cooperation and Ocean Governance*.
- Banlaoi, R. C. (2021). *The Bilateral Consultative Mechanism on the South China Sea and Philippines-China Relations*. 51, 1–8.
- BBC News. (2017, October 18). Xi Jinping: “Time for China to take centre stage.” *BBC News*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-41647872>
- Bernstein, R., & Munro, R. H. (1997). *The coming conflict with China*. A.A. Knopf.
- Bijian, Z. (2005). China’s Peaceful Rise - Speeches of Zheng Bijian, 1997-2005. *Journal of Contemporary Asia*, 1–88.
- Britannica. (2022). *Chinese Civil War - Nationalist collapse and the establishment of the People’s Republic of China (1949)*. <https://www.britannica.com/event/Chinese-Civil-War/Nationalist-collapse-and-the-establishment-of-the-Peoples-Republic-of-China-1949>
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods*, 4th Edition. In *Oxford University Press* (4th Editio). Oxford University Press.
- Butterfield, H. (1951). *History and Human Relations* (1st Editio). Collins.
- Buzan, B. (2010). China in international society: Is “peaceful rise” possible? *Chinese Journal of International Politics*, 3(1), 5–36. <https://doi.org/10.1093/cjip/pop014>
- Buzan, B. (2014). The logic and contradictions of “peaceful rise/development” as China’s grand strategy. *Chinese Journal of International Politics*, 7(4), 381–420. <https://doi.org/10.1093/cjip/pou032>
- China Daily. (2018). *Speech delivered by President Xi at the NPC closing meeting*. China Daily. http://www.chinadaily.com.cn/hkedition/2018-03/22/content_35894512.htm
- China Military Online. (2022, June 24). *China, Vietnam wrap up 32nd joint patrol in Beibu Gulf*. Ministry of National Defense of the People’s Republic of China. http://eng.mod.gov.cn/news/2022-06/24/content_4913975.htm
- Ciftci, O. (2009). “A Comparative Analysis of The National Intetrest Concept in Theories of International Relations”,. *Thesis, Dokuz Eylul University*, 203.
- Citéco. (2010). *China becomes the world’s second largest economic power (by GDP, in current dollar terms)*. Citéco. <https://www.citeco.fr/10000-years-history-economics/contemporary-world/china-becomes-the-world-s-second-largest-economic-power-by-gdp-in-current-dollar-terms>

- CRS. (2015). *Chinese Land Reclamation in the South China Sea: Implications and Policy Options*. The Congressional Research Service United States.
- Dahm, J. M. (2020). *Introduction to SCS MILCAP Studies*.
- Department of Defense. (2018). Military and Security Developments Involving the PRC 2018. In *Office of the Secretary of Defense*.
- Department of Defense. (2021). Military and Security Developments Involving the People's Republic of China. In *Office of the Secretary of Defense*.
- Dobell, G. (2014, June 12). China's peaceful rise into pieces | The Strategist. *The Strategist*. <https://www.aspistrategist.org.au/chinas-peaceful-rise-into-pieces/>
- Embassy of PRC in Republic of the Philippines. (2019, April 3). *CHINA, PHILIPPINES CONVENE THE FOURTH MEETING OF THE BILATERAL CONSULTATION MECHANISM ON THE SOUTH CHINA SEA*. Embassy of PRC in Republic of the Philippines. http://ph.china-embassy.gov.cn/eng/zfgx/zzgx/201904/t20190403_1336129.htm
- GONG, X. U. E. (2020). Non-traditional security cooperation between China and south-east Asia: implications for Indo-Pacific geopolitics. *International Affairs*, 96, 29–48. <https://doi.org/10.1093/ia/iiz225>
- Green, M., Hicks, K., Cooper, Z., Schaus, J., & Douglas, J. (2017a, June 9). *Counter-Coercion Series: Second Thomas Shoal Incident*. Asia Maritime Transparency Initiative. <https://amti.csis.org/counter-co-2nd-thomas-shoal/>
- Green, M., Hicks, K., Cooper, Z., Schaus, J., & Douglas, J. (2017b, June 12). *Counter-Coercion Series: China-Vietnam Oil Rig Standoff*. Asia Maritime Transparency Initiative. <https://amti.csis.org/counter-co-oil-rig-standoff/>
- Guo, S., & Blanchard, J.-M. F. (2008). "Harmonious world" and China's new foreign policy. 248.
- Herz H, J. (1951). Political Realism and Political Idealism. In *University of Chicago Press* (First Edit). University of Chicago Press. <https://www.cambridge.org/core/article/political-realism-and-political-idealism-by-john-h-herz-chicago-university-of-chicago-press-1951-pp-xii-276-375/79FBF7D3CD6CDEF6CEBE06B18A1BABF3>
- Hu, J. (2005). *Statement by H.E. Hu Jintao President of the People's Republic of China At the United Nations Summit*.
- Huntington, S. P. (1993). The Clash of Civilizations? *Foreign Affairs*, 72(3), 22–49. <https://doi.org/10.2307/20045621>
- International Crisis Group. (2021a). Competing Visions of International Order in the South China Sea. In *International Crisis Group* (Issue 315). <https://www.crisisgroup.org/asia/north-east-asia/china/315-competing->

visions-international-order-south-china-sea

- International Crisis Group. (2021b). *The Philippines' Dilemma: How to Manage Tensions in the South China Sea*. <https://www.crisisgroup.org/asia/north-east-asia/china/316-philippines-dilemma-how-manage-tensions-south-china-sea>
- International Crisis Group. (2021c). *Vietnam Tacks Between Cooperation and Struggle in the South China Sea*. <https://www.crisisgroup.org/asia/north-east-asia/china/318-vietnam-tacks-between-cooperation-and-struggle-south-china-sea>
- Japan Ministry of Defense. (2018). A strategic analysis of the South China Sea territorial issues. In *Japan Ministry of Defense*.
- Jervis, R. (1976). *Perception and Misperception in International Politics* (REV- Revi). Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvc77bx3>
- Jervis, R. (1978). Cooperation Under the Security Dilemma. In *World Politics* (Vol. 30, Issue 2, pp. 167–214). <http://www.jstor.org/stable/2009376>
- Jervis, R. (2001). Was the Cold War a Security Dilemma? *Journal of Cold War Studies*, 3(1), 36–60. <https://www.jstor.org/stable/26925099>
- JINMING, L. I., & DEXIA, L. I. (2003). The Dotted Line on the Chinese Map of the South China Sea: A Note. *Ocean Development and International Law - OCEAN DEV INT LAW*, 34, 287–295. <https://doi.org/10.1080/00908320390221821>
- Johnston, A. I. (2013). How New and Assertive Is China's New Assertiveness? *International Security*, 37(4), 7–48. https://doi.org/10.1162/ISEC_a_00115
- Kiyonno, K. (1969). A Study on the Concept of The National Interest of Hans J. Morgenthau: as The Standard of American Foreign Policy. *NAOSITE*, 1–20. http://naosite.lb.nagasaki-u.ac.jp/dspace/bitstream/10069/27783/1/keieikeizai49_03_04.pdf
- LaGrone, S. (2016, January 6). Head of Chinese Navy Defends South China Sea Moves in Teleconference with CNO Richardson. *USNI News*. <https://news.usni.org/2016/01/20/head-of-chinese-navy-defends-south-china-sea-moves-in-teleconference-with-cno-richardson>
- Layton, P. (2021). *China's Enduring Grey-Zone Challenge*. Canberra: Air and Space Power Centre.
- Lee, J. (2013, March 3). China's peaceful rise less likely. *The Australian*. <https://www.theaustralian.com.au/national-affairs/opinion/chinas-peaceful-rise-less-likely/news-story/c67e51ad7de21c151612d97ed8e51eef>
- Liang Fook, L., & Hoang Hop, H. (2019). The Vanguard Bank Incident:

Developments and What Next? *ISEAS Perspective*, 69, 1–9.

- Macrotrends. (2022). *China Economic Growth 1960-2022*. Macrotrends.
<https://www.macrotrends.net/countries/CHN/china/economic-growth-rate>
- Mastro, O. S. (2021). Chinese Intentions in the South China Sea. *The 2020-21 Wilson China Fellowship: Essays on the Rise of China and Its Implications*, 332–351.
- Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. (n.d.). “*Set aside dispute and pursue joint development.*” Retrieved January 14, 2023, from https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/200011/t20001117_697808.html
- Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. (2018, February 13). *Joint Press Release Second Meeting of China-Philippines Bilateral Consultation Mechanism on the South China Sea*. Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China.
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/gjhdq_665435/2675_665437/2762_663528/2764_663532/201802/t20180213_521300.html
- Mission of the People’s Republic of China to ASEAN. (2017, May 21). *JOINT PRESS RELEASE FOR THE FIRST MEETING OF THE CHINA-PHILIPPINES BILATERAL CONSULTATION MECHANISM ON THE SOUTH CHINA SEA*. Mission of the People’s Republic of China to ASEAN.
http://asean.china-mission.gov.cn/eng/zdjl/201705/t20170521_8236017.htm
- Mogato, M. (2015, July 14). Exclusive: Philippines reinforcing rusting ship on Spratly reef outpost - sources. *Reuters*. <https://www.reuters.com/article/us-southchinasea-philippines-shoal-exclu-idUSKCN0PN2HN20150714>
- Morgenthau, H. J. (1949). The Primacy of the National Interest. *The American Scholar*, 18(2), 207–212. <http://www.jstor.org/stable/41205156>
- Office of the Secretary of Defense. (2020). Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China. In *Office of the Secretary of Defense*.
- Organski, A. (1958). *World politics*. Knopf.
- Perlez, J. (2014, November 23). China Said to Turn Reef Into Airstrip in Disputed Water - The New York Times. *The New York Times*.
<https://www.nytimes.com/2014/11/24/world/asia/china-said-to-be-building-airstrip-capable-area-in-disputed-waters.html>
- PRC Ministry of Foreign Affairs. (2019, October 29). *Fifth Meeting of the China-Philippines Bilateral Consultation Mechanism on the South China Sea*. PRC Ministry of Foreign Affairs.
https://www.fmprc.gov.cn/nanghai/eng/wjbxw_1/201910/t20191029_8523414.htm

- Qi, H. (2019). Joint development in the South China sea: China's incentives and policy choices. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 8(2), 220–239. <https://doi.org/10.1080/24761028.2019.1685427>
- Schweller, R. L. (1992). Domestic Structure and Preventive War: Are Democracies More Pacific? *World Politics*, 44(2), 235–269. <https://doi.org/10.2307/2010448>
- Shimko, K. L. (1992). Realism, Neorealism, and American Liberalism. *The Review of Politics*, 54(2), 281–301. <http://www.jstor.org/stable/1407486>
- Singh, S. (2014, March 19). Xi's proactive foreign policy fruitful. *China Daily*. https://www.chinadaily.com.cn/opinion/2014-03/19/content_17358201.htm
- Stashwick, S. (2019, August 19). China's South China Sea Militarization Has Peaked. *Foreign Policy*. <https://foreignpolicy.com/2019/08/19/chinas-south-china-sea-militarization-has-peaked/>
- State Council Information Office. (2011, September). *China's Peaceful Development*. State Council Information Office. http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2014/09/09/content_281474986284646.htm
- Suettinger, R. L. (2004). The Rise and Descent of "Peaceful Rise." *China Leadership Monitor*, 12, 1–10. http://media.hoover.org/sites/default/files/documents/clm12_rs.pdf
- Suwarman, E., Watunwotuk, K., Melianti, L., Rosari, M., Yewen, N., & Naomi, R. (2018). Rivalitas Geopolitik Amerika Serikat - Tiongkok Di Myanmar. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 2(2), 180–191. <https://doi.org/10.33541/japs.v2i2.1071>
- T.H. Lam. (2019). Chinese FDI in Vietnam : Trends , Status and Challenges. *ISEAS Perspective*, 34, 1–10.
- Tang, S. (2009). The Security Dilemma: A Conceptual Analysis. *Security Studies - SECUR STUD*, 18, 587–623. <https://doi.org/10.1080/09636410903133050>
- Thayer, C. (2019, November 14). *The End of the Vanguard Bank Standoff Does Not Resolve the Confrontation's Root Cause*. Radio Free Asia. <https://www.rfa.org/english/commentaries/vanguard-confrontation-11142019112524.html>
- Tréglodé, B. de. (2016). Maritime Boundary Delimitation and Sino-Vietnamese Cooperation in the Gulf of Tonkin (1994-2016). *China Perspectives*, 2016(3), 33–41. <https://doi.org/10.4000/chinaperspectives.7030>
- Tuan, H. A. (2014, May 19). China's South China Sea Play: The End of Beijing's "Peaceful Rise"? | The National Interest. *The National Interest*. <https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/chinas-south-china-sea-play-the->

end-beijings-peaceful-rise-10489

- UNCTAD. (2021). Investing in Sustainable Recovery. *World Investment Report 2021*, 1–35. <https://doi.org/10.18356/9789210054638c006>
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Waveland Press.
<http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=B8246FCBB0D635AD5A37BBAE4858BC8C>
- Wong, C. H. (2014, May 11). Vietnam Leader Criticizes China Over Oil Rig - WSJ. *The Wall Street Journal*.
<https://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303851804579555064255482796>
- World Integrated Trade Solution. (2023). *Trade Statistics by Country*. World Integrated Trade Solution.
<https://wits.worldbank.org/countrystats.aspx?lang=en>
- Xiaodong, X. (2021). China-Vietnamese fishery co-op needs new perspectives. *Chinadaily.Com.Cn*.
<https://www.chinadaily.com.cn/a/202102/01/WS601754e3a31024ad0baa655e.html>
- Xuequan, M. (2018, October 18). Full Text: Joint Press Release for the Third Meeting of the China-Philippines Bilateral Consultation Mechanism on the South China Sea - Xinhua | English.news.cn. *Xinhua*.
http://www.xinhuanet.com/english/2018-10/18/c_137542390.htm
- Yilmaz, 姚. S. (2015). Island Development and Reclamation in South China Sea: A Comparative Study of the Activities of China, Vietnam, and the Philippines. *SCSTT*.
- Zhang, J. (2015a). China's growing assertiveness in the South China Sea A Strategic Shift? *National Security College*.
- Zhang, J. (2015b). China's new foreign policy under xi jinping: Towards 'peaceful rise 2.0'? *Global Change, Peace and Security*, 27(1), 5–19.
<https://doi.org/10.1080/14781158.2015.993958>
- Zheng, B. (2004). *Zheng Bijian, 'China's peaceful rise and opportunities for the Asia-Pacific region,' speech at the Roundtable Meeting between Boao Forum for Asia and China Reform Forum*.